

MENUMBUHKAN BUDAYA PENDAMPINGAN

Potret Implementasi Awal Program 7 Jurus BK
Hebat dan Kebijakan Guru Wali di Sekolah



PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KEMENDIKDASMEN

MENUMBUHKAN BUDAYA PENDAMPINGAN

Potret Implementasi Awal Program 7 Jurus BK
Hebat dan Kebijakan Guru Wali di Sekolah



PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KEMENDIKDASMEN

Menumbuhkan Budaya Pendampingan: Potret Implementasi Awal Program 7 Jurus BK Hebat dan Kebijakan Guru Wali di Sekolah

Pengarah

Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Toni Toharudin, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Arif Jamali, Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Pembelajaran dan Sekolah Unggul
Moch. Abduh, Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan
Muhammad Yusro, Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Penanggung Jawab

Irsyad Zamjani, Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Penyusun

Yahya Fathur Rozy | Pipit Aidul Fitriyana | Deni Murdiani | Laila Hanifah | Lukman Solihin

Penelaah

Andar Nubowo | Ahmad Fuad Fanani | Ali Noer Zaman | Lukman Nul Hakim

Penyunting

Lukman Solihin | Asma Aisha

Foto Sampul

Dokumentasi BSKAP | Ibar Warsita

Tata Letak

Fardelia Nurhaliza

Cetakan pertama, Oktober 2025
xii + 54 hlm; 15,5 x 23 cm

Pengutipan/Sitasi:

Rozy, Y. F., Fitriana, P. A., Murdiani, D., Hanifah, L., Solihin, L. (2025). *Menumbuhkan Budaya Pendampingan: Potret Implementasi Awal Program 7 Jurus BK Hebat dan Kebijakan Guru Wali di Sekolah*. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.

Diterbitkan tahun 2025 atas kerja sama Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen dengan MAARIF Institute – for Culture and Humanity, Jakarta.

Penerbit:

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikdasmen
Kemendikdasmen Gedung B, Cipete Selatan, Cilandak. Jakarta 12410
Telp. +6221-5736365 | Faks. +6221-5741664
Website: <https://pskp.kemendikdasmen.go.id/>
Email: pskp.kemendikbudristek@gmail.com

© Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikdasmen 2025

Buku ini dapat diperbanyak dan diterjemahkan baik sebagian maupun keseluruhan, tetapi tidak untuk diperjualbelikan maupun digunakan untuk tujuan komersial.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Laporan studi ini disusun untuk memotret kesiapan dan evaluasi awal implementasi Program 7 Jurusan BK Hebat (7 JBH) serta peran guru wali pada fase *on the job learning* (OJL) di sejumlah satuan pendidikan. Studi ini lahir dari komitmen menghadirkan layanan bimbingan dan konseling yang lebih baik di masa mendatang.

Studi ini dilaksanakan di lima lokasi yang mewakili keragaman wilayah dan konteks: Mataram (NTB), Pekanbaru (Riau), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Manado (Sulawesi Utara), dan Kabupaten Bandung (Jawa Barat). Data dihimpun melalui wawancara dan observasi pada satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK, dengan melibatkan pemangku kepentingan kunci: BGTK, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala sekolah, dan calon fasilitator daerah (Fasda).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Ditjen GTKPG, para fasilitator nasional (Fasnas), dan tim di BGTK yang telah menyiapkan ekosistem pelatihan serta pendampingan berjenjang. Penghargaan kami sampaikan kepada dinas pendidikan yang memfasilitasi koordinasi, serta para kepala sekolah dan guru yang menyediakan waktu untuk berbagi informasi sehingga kami dapat menangkap dinamika awal OJL dan peran guru wali di sekolah. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Tim MAARIF Institute atas kerja samanya dalam pelaksanaan studi hingga membuahkan hasil berupa laporan ini.

Kami menyadari studi ini memiliki berbagai keterbatasan karena memotret implementasi awal pada fase OJL. Walau demikian, kami meyakini bukti awal yang tersaji cukup untuk mengidentifikasi kesiapan, praktik baik, dan hambatan kunci, serta merumuskan rekomendasi bagi penguatan desain program, tata kelola, dan adaptasi praktik baik yang sudah berjalan.

Semoga ikhtiar bersama ini memperkuat budaya pendampingan yang konsisten, terukur, dan berdampak nyata pada kesejahteraan serta arah belajar dan karier murid ke depan.

Jakarta, Oktober 2025
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Irsyad Zamjani



RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi ini memotret bagaimana program 7 Jurus BK Hebat (7 JBH) dan peran guru wali mulai diterjemahkan menjadi praktik di satuan pendidikan pada fase awal *on the job learning* (OJL). Pada tataran kebijakan, dua arus utama bergerak beriringan, 7 JBH menata ulang cara guru, bukan hanya guru BK, memberikan layanan konseling yang ringkas, fokus, dan interaktif, sementara kebijakan guru wali memberi landasan bagi pendampingan longitudinal pada sisi akademik, karakter, sosial, emosional murid yang terintegrasi dalam tata kelola sekolah. Kerangka ini diposisikan untuk menggeser praktik BK dari dominan kuratif menjadi lebih preventif dan pengembangan, sejalan dengan penataan beban kerja dan jalur pembinaan guru dalam kebijakan nasional yang berlaku.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menangkap pengalaman implementasi awal secara mendalam. Data primer dihimpun melalui observasi dan wawancara dengan UPT Kemendikdasmen, dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi, kepala sekolah, serta calon fasilitator daerah (Fasda) pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Pemilihan lokasi dan informan dilakukan secara purposif, mewakili lintas pulau dan zona waktu serta memastikan wilayah telah menyelesaikan Bimtek Calon Fasda dan sedang menjalankan OJL, sehingga praktik awal dapat diobservasi langsung. Total terdapat 44 unit informan terkumpul dari lima daerah penelitian.

Temuan utama memperlihatkan arah perubahan yang menjanjikan. Di banyak sekolah, 7 JBH dilaksanakan melalui kerangka ARKA (aktivitas, refleksi, konseptual, aplikasi) guna mengatasi problem klasik layanan konseling yang selama ini monoton dan terkesan satu arah. ARKA memadatkan sesi dalam alur yang jelas, menjaga kedalaman pedagogis tanpa prosedur bertele-tele, serta membuka ruang partisipasi murid. Bukti lapangan menunjukkan pergeseran dari ceramah menuju dialog berbasis data yang meningkatkan keterlibatan,

memperjelas perencanaan belajar/karier murid, dan memperbaiki iklim kelas. Temuan literatur yang mengkritik dominasi metode ceramah menjadi konteks pembandingan yang menguatkan urgensi pembaruan ini.

Di saat yang sama, gambaran kesiapan kelembagaan guru wali menunjukkan sinyal awal yang positif sekaligus “pekerjaan rumah” yang perlu ditangani segera. Mayoritas sekolah di lokasi studi telah menerbitkan surat SK penetapan guru wali, langkah awal yang krusial karena memberi dasar legal untuk penugasan, penjadwalan perwalian, dan pencatatan layanan, meski pemahaman dan kedalaman implementasi belum merata antarsekolah. Terdapat sekolah yang telah menetapkan rasio binaan, SOP, serta jadwal pertemuan rutin, tetapi ada pula yang masih memaknai guru wali sebatas penunjukan administratif tanpa jadwal yang baku dan penentuan ekuivalensi jam. Temuan ini menandai kesenjangan antara legalitas dan kapasitas yang perlu segera dijumpai melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan penataan prosedur kerja.

Kendala implementasi pada fase awal OJL juga ditemukan. Variasi jadwal Bimtek antarwilayah membuat kedalaman pelaksanaan tidak seragam, sebagian sekolah baru memulai OJL pada jurus pertama, sementara yang lain telah menuntaskannya. Hambatan struktural, terutama belum terinstitusinya jam klasikal BK, keterbatasan sarpras, dan alokasi waktu, menciptakan ketimpangan ritme dan bukti praktik. Implikasi kebijakan paling dekat adalah perlunya mandat sekolah/dinas untuk menetapkan jam klasikal dan menyediakan sarana minimum agar kualitas sesi OJL tetap terjaga, disertai penguatan *coaching* pascapelatihan.

Berdasarkan temuan tersebut, studi ini merekomendasikan penguatan desain pelatihan berjenjang dengan *coaching clinic* tematik pascapelatihan, penyediaan borang monitoring yang seragam dan integrasi bukti OJL di LMS, serta pembiayaan minimal untuk monitoring hibrida UPT dan dinas agar umpan balik praktik OJL berjalan cepat dan menyeluruh. Di tingkat pemerintah daerah, prioritas kebijakan meliputi penetapan jam klasikal BK, mandat resmi OJL, penganggaran APBD untuk *coaching*/monitoring, penyeimbangan rasio layanan (guru wali dan murid) berikut ekuivalensi jam. Di tingkat sekolah, kunci tindak lanjut adalah penyempurnaan SOP OJL, penjadwalan perwalian dan format dokumentasi sederhana, pengadaan sarpras minimum, serta penataan

alur kolaborasi antara guru wali, guru BK, dan wali kelas agar pendampingan terdokumentasi dan berkelanjutan.

Studi ini juga memiliki keterbatasan: temuan studi hanya memotret fase awal OJL, ketika daerah berada pada tahapan pelaksanaan yang berbeda, dan kebijakan guru wali masih sangat baru diterapkan. Karena itu, hasil studi ini perlu dibaca sebagai evaluasi awal yang memberi arah penguatan, bukan pengukuran dampak program. Ke depan, penguatan kapasitas implementasi, standarisasi prosedur, dan pengaturan waktu yang lebih tegas diperkirakan akan mempercepat transformasi praktik konseling menjadi budaya pendampingan yang konsisten, terukur, dan berdampak pada kesejahteraan serta masa depan belajar murid.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	4
BAB 2 Metode Penelitian	7
A. Pendekatan Penelitian dan Sumber Data	7
B. Penentuan Sampel dan Lokasi	7
C. Teknik Pengumpulan Data	8
D. Teknik Analisis Data	9
E. Batasan Studi	9
BAB 3 Pembahasan Hasil Temuan Studi	11
A. Gambaran Umum Program 7 JBH dan Kebijakan Guru Wali	11
A.1. Program 7 JBH	11
A.2. Kebijakan Guru Wali	14
B. Gambaran Implementasi dan Dampak Awal Program 7 JBH	17
B.1. Gambaran Pelaksanaan OJL di Satuan Pendidikan	17
B.2. Dampak Awal Program 7 JBH	19
B.3. Hambatan dan Tantangan Implementasi Program 7 JBH (Sesi OJL)	29
C. Gambaran Implementasi Kebijakan Guru Wali di Sekolah	34
C.1. Mayoritas Sekolah Sudah Menerbitkan SK Guru Wali	34
C.2. Beberapa Sekolah Belum Memahami Tugas dan Peran Guru Wali	36

BAB 4 Rekomendasi Kebijakan	39
A. Rekomendasi untuk Kemendikdasmen (Ditjen GTKPG)	40
B. Rekomendasi untuk UPT Kemendikdasmen di Daerah	40
C. Rekomendasi untuk Dinas Provinsi dan Kab/Kota	41
D. Rekomendasi untuk Satuan Pendidikan	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	47



A. Latar Belakang

Selama ini, layanan bimbingan dan konseling (BK) di satuan pendidikan kerap dipersepsikan semata sebagai “pemadam kebakaran” atau “polisi sekolah” untuk murid yang berperilaku menyimpang atau memiliki masalah disiplin. Persepsi sempit ini bertentangan dengan kerangka kebijakan nasional yang menempatkan BK sebagai layanan holistik yang mencakup fungsi pencegahan, pengembangan, dan kuratif untuk membantu perkembangan optimal murid pada ranah pribadi, sosial, pengalaman belajar, dan karier masa depan. Penegasan ini telah termaktub dalam ketentuan tentang penyelenggaraan BK pada pendidikan dasar dan menengah, yang menempatkan konselor/guru BK sebagai penyelenggara layanan psiko-edukatif terstruktur, berkelanjutan, dan kolaboratif di ekosistem satuan pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014).

Riset di Kabupaten Serang menunjukkan 40% guru BK menangani >300 murid dan hanya 3,6% yang sesuai rasio 1:150 sebagaimana diatur dalam Permendikbud 111/2014. Di temuan lain, dua guru BK melayani ± 1.006 murid (lebih dari 500 murid per guru), sebuah beban yang secara praktis mengubah konseling menjadi kerja reaktif (kasuistik) ketimbang pendampingan komprehensif (Perawati & Santosa, 2024). Pada tingkat nasional, Kemenko PMK (Firmansyah, 2024) mengungkapkan Indonesia hanya memiliki sekitar 58 ribu guru BK untuk ± 45 juta murid, dengan standar 1:150, kebutuhan mendekati 300 ribu, artinya defisit ± 242 ribu guru BK. Gambaran konkret ini memperjelas mengapa persepsi “BK sebagai polisi sekolah” bertahan. Daya dukung struktural belum memungkinkan layanan holistik hadir secara merata bagi semua murid.

Kenyataan di lapangan juga menunjukkan, kompetensi pendidik untuk memberikan dukungan BK yang efektif dan relevan masih belum merata.

Jumlah guru BK belum ideal, sementara kapasitas dasar BK pada guru non-BK bervariasi sehingga dukungan psikososial kepada murid kerap tidak sistematis. Merespons kesenjangan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen RI) meluncurkan program prioritas Pengembangan Kompetensi Guru dalam Memberikan Layanan BK melalui program prioritas 7 Jurus BK Hebat (7 JBH). Petunjuk teknis program 7 JBH menata secara detail alur pelatihan berbasis *Learning Management System* (LMS), mulai dari pelatihan intensif Fasilitator Nasional (Fasnas) dan Fasilitator Daerah (Fasda), dan tahap *On the Job Learning* (OJL) di sekolah, sertifikasi, hingga penjaminan mutu berjenjang. Pada tahap OJL, para peserta Bimtek pada level daerah diminta mengimplementasikan minimal dua "jurus" BK kepada murid dan mendiseminasikan praktik baik kepada rekan guru di satuan pendidikan masing-masing. Struktur materi inti secara eksplisit merinci tujuh jurus sebagai fokus penguatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan guru (Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, Dan Pendidikan Guru Nomor 17/B/HK.03.01/2025).

Kebutuhan penguatan kapasitas ini semakin mendesak karena tantangan kesejahteraan psikologis murid kian kompleks. Di tengah penetrasi ruang digital, perundungan siber (*cyberbullying*), kecanduan media sosial, kekerasan seksual, krisis identitas, serta peningkatan masalah kesehatan mental (stres, kecemasan, hingga depresi) diperlukan adanya pendekatan layanan bimbingan dan konseling yang lebih komprehensif dan preventif di sekolah. Secara normatif, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengamanatkan ekosistem belajar yang aman, berkeadilan, dan berfokus pada edukasi, pencegahan, serta tatalaksana kasus. Bukti ilmiah juga menguatkan urgensi tersebut. Tinjauan dan meta-analisis menunjukkan keterkaitan kuat antara *cyberbullying* dan gejala depresi pada remaja (Astutik & Dewi, 2022). Profil kesehatan remaja Indonesia menandai kecemasan sebagai gangguan mental yang paling lazim. Hal ini menuntut intervensi berbasis sekolah yang sistematis (I-NAMHS, 2022).

Beberapa hasil studi internasional menunjukkan bahwa konseling dan dukungan kesehatan mental berbasis sekolah berpengaruh nyata terhadap capaian akademik, keterampilan sosial dan emosional, dan iklim belajar.

Studi terhadap 213 program *social-emotional learning* (SEL) menemukan peningkatan keterampilan, perilaku, dan prestasi akademik bila intervensi konseling dijalankan secara sistematis oleh guru/konselor di sekolah (Durlak dkk., 2011). Sementara, telaah di *The Lancet Psychiatry* menegaskan efektivitas intervensi kesehatan mental berbasis sekolah lintas konteks, dari promosi hingga pencegahan dan kuratif (Fazel dkk., 2014). Bukti kuantitatif lainnya menunjukkan layanan kesehatan mental berbasis sekolah menurunkan masalah psikologis dengan efek kecil hingga menengah, terutama ketika intervensi ditargetkan pada kelompok berisiko (Sanchez dkk., 2018). Secara konsisten, studi-studi tersebut menegaskan bahwa layanan konseling berbasis sekolah berdampak nyata pada pembelajaran dan kesejahteraan mental, yakni meningkatkan keterampilan sosial-emosional, perilaku, serta prestasi, sekaligus menurunkan masalah psikologis. Efektivitas tertinggi muncul ketika program dilaksanakan sistematis oleh guru/konselor dan ditargetkan pada kelompok berisiko, dari promosi hingga pencegahan dan kuratif di berbagai konteks pendidikan.

Dalam arsitektur kebijakan pembelajaran dan pembimbingan mutakhir, peran guru wali dipertegas untuk memperluas jangkauan pendampingan murid secara berkelanjutan. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, menempatkan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan, termasuk tugas sebagai guru wali, sebagai bagian dari tugas guru yang sah, dengan cakupan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi dan keterampilan, serta penguatan karakter murid. Regulasi yang sama menegaskan kolaborasi guru wali dengan guru BK dan wali kelas serta mekanisme penetapannya oleh kepala satuan pendidikan dengan mempertimbangkan rasio murid dan guru. Ketentuan ekuivalensi beban kerja untuk tugas pendampingan juga disediakan sehingga integrasi peran guru wali dalam manajemen kinerja guru memiliki pijakan administratif yang jelas.

Penguatan peran ini selaras dengan kerangka profesionalitas konselor/guru BK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, sekaligus beririsan dengan pengaturan beban kerja terkini melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 yang memperbarui ketentuan pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dengan demikian, mandat layanan BK serta pendampingan oleh guru wali sudah didasari landasan normatif yang konsisten dari aspek kompetensi profesi hingga manajemen beban kerja.

Saat ini, program 7 JBH berada pada fase implementasi awal melalui OJL. Secara nasional, Bimtek Fasnas dilaksanakan pada Juni-Juli 2025, sedangkan Bimtek Fasda dimulai Agustus 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di antaranya; BBGTK (Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan), BGTK (Balai Guru dan Tenaga Kependidikan), KGTK (Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan), diikuti OJL selama kurang lebih empat minggu (setara ± 20 jam pelajaran [JP]) di sekolah. Rangkaian ini disertai pendampingan dan supervisi berjenjang serta target diseminasi praktik baik kepada kepala sekolah, guru BK, guru kelas, dan guru mata pelajaran lainnya. Konfigurasi tersebut memastikan bahwa penguatan kompetensi tidak berhenti pada pelatihan, melainkan diuji dan ditumbuhkembangkan dalam konteks kerja nyata guru di kelas dan sekolah masing-masing.

Berpijak dari konteks kebijakan, kesenjangan kapasitas, dan eskalasi tantangan kesejahteraan psikologis murid di atas, ***studi ini dirancang untuk memahami implementasi awal Program 7 Jurusan BK Hebat pada fase OJL dan peran guru wali di satuan pendidikan.*** Fokus evaluasi meliputi pergeseran pemahaman peran BK dari semata kuratif menjadi preventif, peningkatan keterampilan dasar BK pada guru (termasuk guru non-BK), serta indikasi perbaikan iklim psikologis dan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Hasil studi diharapkan memberi masukan berbasis bukti bagi pemerintah pusat, UPT, dan dinas pendidikan untuk penguatan desain program, penjaminan mutu, dan replikasi praktik baik pada skala yang lebih luas.

B. Tujuan Penelitian

Studi ini difokuskan untuk menyajikan evaluasi awal (*early evaluation*) yang menggambarkan bagaimana kebijakan dan modul 7 JBH diterjemahkan menjadi praktik konseling di satuan pendidikan yang singkat, fokus, dan interaktif di kelas, serta bagaimana mandat guru wali dipahami,

dioperasionalkan, dan ditopang perangkat kelembagaan di satuan pendidikan. Hasil evaluasi awal ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi operasional bagi kementerian, UPT, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan.

Secara khusus, penelitian menargetkan capaian-capaian berikut. *Pertama*, memotret kesiapan implementasi 7 JBH pada fase OJL di lima lokasi studi, mencakup pemahaman substansi 7 JBH oleh calon Fasda, tahapan pelaksanaan OJL, serta luaran awal OJL seperti rancangan sesi OJL, instrumen asesmen, portofolio praktik, dan bentuk sosialisasi substansi modul 7 JBH ke guru lain. *Kedua*, menilai perubahan pedagogis pada satuan pendidikan sebagai indikasi dampak awal penerapan OJL, termasuk pergeseran dari ceramah satu arah ke sesi yang berkerangka ARKA (aktivitas, refleksi, konseptual, aplikasi), pemanfaatan asesmen cepat berbasis gawai, serta inovasi sederhana pelengkap modul 7 JBH. *Ketiga*, mengidentifikasi hambatan utama sesi OJL. *Keempat*, memetakan status peran guru wali dari sisi legalitas (surat keputusan [SK] penetapan), operasional (jadwal perwalian, ekuivalensi jam, rasio binaan), kolaborasi (dengan guru BK/wali kelas), serta level pemahaman mandat pendampingan akademik, karakter, dan sosial emosional yang bersifat longitudinal dari murid masuk hingga lulus. *Kelima*, memetakan pola dukungan pemerintah daerah (perencanaan, penganggaran, MGMP BK, sarpras) untuk memastikan keberlanjutan program di luar sesi pelatihan awal OJL.

Dengan rumusan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan menghasilkan gambaran kesiapan dan implementasi awal yang komprehensif sekaligus memahami berbagai tantangan yang dihadapi sebagai ruang perbaikan dan penguatan kebijakan ke depan. Harapannya program 7 JBH dan kebijakan guru wali menjadi budaya pendampingan yang konsisten, terukur, dan berdampak nyata pada kesejahteraan psikologis, perkembangan karakter, serta arah belajar dan karier murid di masa depan pada satuan pendidikan.



A. Pendekatan Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai kesiapan implementasi Program 7 JBH dan peran guru wali di satuan pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi proses, pengalaman, dan makna yang dibangun para pemangku kebijakan serta pelaksana program pada konteks nyata di satuan pendidikan.

Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan dan perwakilan sekolah pada lokasi terpilih. Sumber data sekunder meliputi nomenklatur dan perangkat kebijakan negara yang relevan dengan layanan BK, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, pengaturan beban kerja guru, serta studi-studi ilmiah bertema serupa. Data sekunder digunakan untuk memperkaya analisis dan melakukan triangulasi terhadap temuan lapangan.

Informan kunci meliputi: (1) perwakilan UPT daerah sebagai simpul penguatan kapasitas dan penjaminan mutu, (2) dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota serta (3) provinsi sebagai pemegang mandat kebijakan dan pembinaan, (4) kepala sekolah serta (5) calon fasilitator daerah (Fasda) pada jenjang SMP, SMA, dan SMK sebagai pelaksana program di tingkat satuan pendidikan. Komposisi ini memungkinkan penelusuran rantai implementasi dari kebijakan ke praktik riil di sekolah.

B. Penentuan Sampel dan Lokasi

Pemilihan informan dan lokasi penelitian dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel non-probabilitas berdasarkan pertimbangan teoritis dan praktis agar informan yang dipilih memiliki relevansi tinggi dan kedalaman informasi terhadap tujuan riset. Dalam penelitian ini,

kriteria purposif ditetapkan pada dua hal. *Pertama*, lokasi mewakili lintas pulau besar dan bagian zona waktu Indonesia untuk menghadirkan variasi konteks kelembagaan, demografis, dan ekosistem sekolah. *Kedua*, wilayah yang dipilih telah menyelesaikan Bimtek Calon Fasda dan sedang menjalankan fase OJL di satuan pendidikan sehingga pengalaman implementasi awal dapat teramati secara langsung.

Penelitian dilaksanakan di lima daerah, yaitu Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB); Kota Pekanbaru, Riau; Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Kota Manado, Sulawesi Utara; dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemilihan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan pelatihan 7 JBH yang sudah sampai pada tahap OJL ketika penelitian dilakukan. Pada masing-masing daerah dilakukan wawancara dan pendalaman data kepada UPT Kemendikdasmen (BGTK), dinas pendidikan provinsi dan kab/kota, serta satuan pendidikan yang terdiri dari jenjang SMP, SMA, dan SMK. Sekolah-sekolah tersebut dipilih karena terdapat perwakilan guru BK yang telah dilatih 7 JBH dan sudah sampai pada tahap OJL. Dari sejumlah informan yang menjadi sasaran studi, hampir seluruhnya dapat diwawancarai, kecuali salah satu calon Fasda dari Kota Manado sehingga total informan yang berhasil diwawancarai berjumlah 44 orang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur menggunakan pedoman yang disesuaikan dengan tipe informan. Wawancara dilakukan serentak secara luring pada tanggal 28 September - 1 Oktober 2025. Seluruh wawancara direkam (dengan persetujuan informan), ditranskrip, dan diperiksa kualitasnya sebelum dianalisis. Dokumen kebijakan dan literatur ilmiah yang relevan ditelaah secara sistematis untuk memperkuat interpretasi dan memastikan kesesuaian temuan dengan kerangka normatif.

Instrumen wawancara memuat alur pertanyaan yang memetakan tema-tema utama seputar praktik implementasi 7 JBH dan peran guru wali di sekolah. Terdapat beberapa aspek penting yang datanya dikumpulkan guna memahami implementasi awal 7 JBH dan peran guru wali tersebut. *Pertama*, aspek kebijakan baik di tingkat daerah maupun di sekolah dalam mendukung implementasi 7 JBH dan guru wali. *Kedua*, dukungan

anggaran atau sumber daya yang diberikan di tingkat daerah dan di satuan pendidikan. *Ketiga*, implementasi 7 JBH dan kebijakan guru wali di tingkat satuan pendidikan. *Keempat*, pendampingan (supervisi) serta monitoring dan evaluasi implementasi yang dilakukan di tingkat daerah maupun satuan pendidikan. *Kelima*, tantangan yang dihadapi dalam implementasi 7 JBH dan kebijakan guru wali. Selain kelima aspek tersebut, khusus untuk guru BK yang merupakan calon Fasda, dilakukan pula pendalaman terkait aspek kemampuan kognitif dan aspek pelaksanaan OJL. Detail instrumen dapat dilihat pada lampiran.

Terkait dengan etika penelitian, setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, bentuk partisipasi, potensi risiko, dan hak untuk menghentikan partisipasi kapan pun tanpa konsekuensi. Persetujuan partisipasi diperoleh sebelum wawancara melalui penandatanganan formulir persetujuan menjadi informan, dan data disimpan secara aman serta hanya digunakan untuk kepentingan studi ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan analisis tematik. Peneliti membaca berulang seluruh transkrip, menyusun kode sesuai fokus tema riset yang kemudian diperkaya secara induktif dari temuan lapangan, mengelompokkan kode menjadi tema dan subtema, lalu menyusun proposisi temuan sesuai dengan tujuan studi.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (BGTK, dinas pendidikan, sekolah) dan triangulasi bahan (wawancara dan dokumen kebijakan/literatur ilmiah). Anonimisasi identitas narasumber diterapkan pada seluruh keluaran untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan informan.

E. Batasan Studi

Studi ini hanya memotret fase awal OJL pelaksanaan Program 7 JBH di satuan pendidikan. Fokus penelitian terletak pada tahap implementasi awal, di mana para guru, kepala sekolah, serta pemangku kebijakan daerah mulai menafsirkan dan menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik keseharian di satuan pendidikan masing-masing. Karena masih berada pada tahap awal

pelaksanaan, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pengukuran dampak secara kuantitatif atau membandingkan efektivitas antardaerah dan instansi.

Perlu dicatat bahwa setiap daerah menyelenggarakan Bimtek Calon Fasda dan menjalankan fase OJL dengan jadwal yang berbeda-beda. Perbedaan waktu pelaksanaan ini berimplikasi pada tingkat kesiapan dan kedalaman refleksi implementasi di masing-masing wilayah. Beberapa daerah telah menyelesaikan OJL sepenuhnya ketika pengumpulan data dilakukan, sementara daerah lainnya masih berada pada tahap adaptasi awal. Kondisi tersebut memengaruhi variasi pengalaman dan keluasan data yang dapat dihimpun dari lapangan.

Selain itu, studi ini juga berupaya menangkap peran guru wali pada masa-masa awal pengangkatannya, mengingat regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan peran tersebut, yakni Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025, baru terbit pada pertengahan tahun 2025. Hal ini membuat banyak sekolah dan dinas masih dalam tahap memahami mandat, menata struktur penugasan, serta menyelaraskan mekanisme beban kerja guru dengan ketentuan baru.



BAB 3

Pembahasan Hasil Temuan Studi

A. Gambaran Umum Program 7 JBH dan Kebijakan Guru Wali

Ringkasan Pembahasan

7 JBH

- Program penguatan kapasitas bertujuan untuk memperluas kompetensi bimbingan dan konseling ke seluruh guru, bukan hanya guru BK.
- Alur belajar berjenjang: LMS Ruang GTK, pelatihan tatap muka, OJL di sekolah.
- Saat OJL, peserta wajib mengimplementasikan minimal 2 jurus, mendokumentasikan praktik, dan mendapat umpan balik dari Fasnas.
- Tata kelola berlapis (Ditjen GTKPG, UPT, dinas pendidikan, sekolah) memastikan standar, mutu, dan skalabilitas lewat jejaring Fasnas-Fasda.

Peran Guru Wali

- Penugasan resmi dari kepek untuk pendampingan berkelanjutan kepada murid dari masuk hingga lulus.
- Cakupan tugas: akademik, pengembangan kompetensi/keterampilan, dan karakter dengan ekuivalensi beban kerja mingguan.
- Ditugaskan oleh kepala sekolah secara proporsional dan berkolaborasi erat dengan guru BK dan wali kelas.

A.1. Program 7 JBH

Program 7 JBH merupakan inisiatif pengembangan kompetensi yang dirancang untuk memperkuat kapasitas guru bimbingan dan konseling (BK) sekaligus memperluas kompetensi bimbingan dan konseling kepada seluruh guru agar setiap pendidik mampu menjadi pendamping tumbuh kembang murid. Program ini diselenggarakan oleh Kemendikdasmen RI melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) dengan kerangka pembelajaran orang dewasa dan pendekatan

experiential learning, sehingga proses pelatihan berangkat dari pengalaman nyata guru, diolah melalui refleksi, dikukuhkan dalam konseptualisasi, lalu diuji dalam praktik terarah. Dengan demikian, penguatan kompetensi tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi berlanjut pada keterampilan dan kebiasaan profesional yang relevan di kelas dan ekosistem sekolah.

Secara substansi, materi pokok program terdiri dari “7 JBH” yang disampaikan oleh narasumber dan/atau Fasnas mengikuti alur belajar terstruktur, dengan seluruh modul, bahan presentasi, aktivitas refleksi, dan evaluasi disediakan melalui LMS Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (RGTK). Setiap peserta mempraktikkan teknik fasilitasi dan jurusan-jurusan tersebut dalam bentuk *microteaching* yang diamati, dinilai, dan direfleksikan bersama. Mekanisme ini untuk memastikan bahwa penguasaan materi dan modul 7 Jurusan tidak semata bersifat konseptual, melainkan teruji melalui umpan balik sejawat dan Fasnas sebelum diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing.

Kandungan tematik dari tujuh jurusan dirancang kontekstual dengan tantangan kekinian murid dan ekosistem sekolah. Di dalamnya, program menekankan kapasitas guru untuk mendampingi murid, berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Kompetensi yang dikuatkan mencakup asesmen dasar potensi, minat, dan bakat, di antaranya mencakup pelatihan *growth mindset* dan ketangguhan (*grit*), pengelolaan emosi dan keterampilan sosial-emosional, pembentukan kebiasaan baik, serta komunikasi empatik guna membangun koneksi yang sehat antara guru, murid, dan keluarga. Penekanan ini selaras dengan sasaran program agar guru BK maupun non-BK memiliki seperangkat *mindset*, *skillset*, dan *toolset* praktis untuk merespons kebutuhan belajar serta kesejahteraan psikologis murid.

Dari sisi tata kelola, peran aktor dirancang berlapis agar penyelenggaraan konsisten dan bermutu. Ditjen GTKPG menyiapkan norma, prosedur, dan kriteria yakni dengan mengembangkan perangkat ajar dan instrumen pemantauan, mengelola LMS, menyiapkan data calon fasilitator, menyelenggarakan Bimtek untuk Fasnas serta admin LMS, dan melakukan supervisi serta penjaminan mutu pelaksanaan di daerah. UPT berkoordinasi

dengan pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelatihan di wilayahnya, menyeleksi peserta, memfasilitasi Bimtek Fasda, memantau pembelajaran termasuk implementasi OJL, serta memastikan diseminasi praktik baik di satuan pendidikan. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan mengusulkan peserta, melakukan koordinasi program, memantau pelaksanaan OJL, dan dapat menyelenggarakan pelatihan secara mandiri sesuai standar. Satuan pendidikan memperbarui data guru, memberikan dukungan keikutsertaan pelatihan, implementasi, dan sosialisasi kepada rekan sejawat.

Alur belajar peserta dirancang berjenjang dan terdokumentasi penuh dalam LMS RGTK. Peserta memulai dengan pembelajaran mandiri (tes awal, akses materi, refleksi, dan rencana tindak lanjut), berlanjut pada pelatihan tatap muka intensif selama empat hari (setara 30 JP), kemudian memasuki fase OJL selama empat minggu (setara 20 JP). Pada fase OJL, setiap peserta wajib mengimplementasikan sedikitnya dua dari tujuh jurus, berbagi pengetahuan dan praktik baik kepada guru di sekolahnya, serta mengunggah portofolio bukti implementasi ke LMS. Sepanjang proses OJL, Fasnas dan/atau UPT memberikan pendampingan dan supervisi untuk memastikan implementasi sejalan dengan rencana yang telah disusun saat pelatihan tatap muka. Setelah seluruh rangkaian terpenuhi, peserta berhak memperoleh sertifikat yang diterbitkan melalui LMS.

Desain program juga memprioritaskan keberlanjutan dan skalabilitas. Pendekatan *microlearning* dan modular membuat materi mudah diingat dan aplikatif. Seluruh aktivitas peserta terdokumentasi dan dapat dipantau melalui LMS sehingga proses penjaminan mutu dan analisis kemajuan dapat dilakukan secara *real-time*. Alur pelatihan dimulai dari Bimtek Fasnas pada bulan Juni-Juli 2025 hingga pelaksanaan Bimtek Fasda yang dimulai pada bulan Agustus 2025. Pada tahun 2025, sasaran penyiapan Fasnas diproyeksikan mencapai 1.200 orang dan Fasda mencapai 18.000 orang, dengan dampak diseminasi yang ditujukan menjangkau 270.000 guru. Proyeksi jangka menengah-panjang menunjukkan skala peserta kumulatif hingga 2.686.261 orang pada 2029, menandakan orientasi program untuk membangun kapasitas sistemik, bukan sekadar intervensi sesaat.

Kesimpulannya, keberhasilan Program 7 JBH bertumpu pada keterlibatan peran antarlembaga, konsistensi pelaksanaan berjenjang, serta bukti implementasi yang tervalidasi di tingkat satuan pendidikan. Dengan pondasi *experiential learning*, pemanfaatan LMS, dan mekanisme OJL yang terstruktur, program ini menutup jarak antara pelatihan dan praktik nyata, memastikan bahwa kompetensi yang dibangun benar-benar hadir dalam interaksi antara guru dan murid dan ekosistem sekolah sehari-hari. Dengan demikian, tujuan strategis untuk menguatkan layanan pencegahan, pengembangan, dan kuratif BK sekaligus memperluas peran pendampingan oleh seluruh guru memperoleh landasan implementasi yang kuat di fase awal dan skalanya dapat ditingkatkan secara bertahap di seluruh daerah.



Gambar 1 Modul 7 Jurus BK Hebat

A.2. Kebijakan Guru Wali

Peran guru wali dihadirkan sebagai penguat pendampingan personal yang berkelanjutan untuk murid pada jenjang menengah (SMP, SMA, dan SMK). Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru menempatkan guru wali sebagai bagian dari pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan murid dalam kerangka pemenuhan beban kerja guru. Melalui pengaturan ini, pendampingan tidak dipandang sebagai aktivitas sukarela atau sekadar budaya sekolah, melainkan tugas yang sah dan terstruktur, dengan ukuran kinerja dan ekuivalensi waktu yang jelas dalam sistem beban kerja guru mingguan. Dengan demikian, guru wali mengisi celah yang selama ini terasa di banyak sekolah, yakni kebutuhan

akan figur pendidik yang mengikuti perjalanan murid secara personal dari saat terdaftar hingga lulus, sekaligus menjadi jembatan antara pengalaman belajar, pengembangan karakter, dan kesejahteraan psikologis murid.

Dalam Permendikdasmen No 11. Tahun 2025, mandat guru wali dijabarkan secara eksplisit. Tugas guru wali mencakup pendampingan akademik, pengembangan kompetensi dan keterampilan, serta penguatan karakter murid yang menjadi dampingannya. Pendampingan bersifat longitudinal, berlangsung sejak murid terdaftar di satuan pendidikan hingga menyelesaikan pendidikannya, sehingga guru wali diidealkan memahami progres belajar, dinamika sosial-emosional, dan konteks keluarga murid secara konsisten. Posisi ini diemban oleh guru mata pelajaran pada satuan pendidikan menengah dan dilaksanakan melalui kolaborasi yang erat dengan guru BK serta wali kelas, agar aspek kurikuler, layanan psikopedagogis, dan tata kelola kelas saling menyokong. Penetapan guru wali dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dengan pertimbangan rasio jumlah murid dan ketersediaan guru di sekolah, sehingga pembagian tugas pendampingan tetap proporsional. Di sisi lain, pendampingan yang dilakukan guru wali memiliki ekuivalensi beban kerja (dua jam tatap muka per minggu) agar kerja pendampingan tercatat dan diakui secara formal dalam sistem manajemen kinerja guru. Konfigurasi mandat, kolaborasi, penetapan, dan ekuivalensi inilah yang memastikan peran guru wali tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dengan peran guru BK dan wali kelas dalam ekosistem sekolah.

Konteks kebijakan ini beriringan dengan agenda penguatan layanan bimbingan dan konseling yang menekankan fungsi pencegahan (preventif) dan pengembangan, bukan semata kuratif. Pada tataran praktik, hal tersebut berarti guru wali bukan hanya hadir ketika muncul masalah, melainkan aktif memantau kemajuan belajar, membangun kebiasaan positif, menumbuhkan keterampilan sosial-emosional, serta menegakkan kondisi kelas yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Peran proaktif tersebut krusial di tengah kompleksitas tantangan kesejahteraan murid, dari perundungan siber hingga tekanan akademik, yang membutuhkan pendampingan dekat dan cepat, sekaligus rujukan profesional yang jelas ketika diperlukan intervensi layanan BK. Dengan konstruksi seperti ini, guru wali menjadi simpul kedekatan

pedagogis yang menautkan keseharian proses belajar dengan dukungan psikososial yang sistematis.

Dari sisi tata kelola sistem, penguatan peran guru wali juga tercermin pada integrasi ke dalam instrumen dan proses administrasi pendidikan. Pembaruan pada platform pendataan pendidikan menyertakan penyesuaian dan validasi terkait tugas tambahan yang merujuk pengaturan beban kerja terbaru, sebuah indikasi bahwa peran ini tidak berhenti pada tataran wacana kebijakan, tetapi masuk ke mekanisme operasional yang dapat dipantau dan diaudit. Integrasi administratif seperti ini penting untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan di seluruh daerah, mencegah variasi penafsiran yang berlebihan, dan mendorong akuntabilitas di tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa kehadiran guru wali adalah penugasan baru yang bersinergi dengan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dalam siaran pers, Kemendikdasmen menempatkan guru wali sebagai pendamping murid baik secara akademik maupun nonakademik, dengan harapan fungsi pencegahan dan pendampingan menjadi lebih kuat ketika diorkestrasikan bersama Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan layanan BK. Pernyataan kebijakan ini memperjelas arah implementasi, yakni guru wali tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari arsitektur perlindungan dan penguatan kesejahteraan mental murid yang terintegrasi (Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, 2025).

Kesimpulannya, peran guru wali adalah jawaban kebijakan terhadap kebutuhan pendampingan personal yang konsisten selama masa studi murid. Ia memperkuat fungsi pencegahan dan pengembangan melalui relasi pedagogis yang berkelanjutan, sekaligus mengaitkannya dengan layanan BK dan tata kelola kelas. Pengakuan normatif melalui aturan beban kerja, mekanisme penetapan yang proporsional, serta integrasi administratif di tingkat sistem memastikan peran ini memiliki daya tindak nyata di sekolah. Dengan landasan tersebut, guru wali diharapkan menjadi tulang punggung pendampingan yang humanis, membantu murid berkembang secara akademik, sosial-emosional, dan karakter, serta memastikan pengalaman belajar yang aman dan bermakna sejak awal terdaftar hingga menamatkan pendidikan pada satuan pendidikan yang sama.

B. Gambaran Implementasi dan Dampak Awal Program 7 JBH

B.1. Gambaran Pelaksanaan OJL di Satuan Pendidikan

Ringkasan Temuan

- Pelatihan 4 hari belum cukup, butuh *coaching* lanjutan pada awal OJL.
- Tahap implementasi beragam, sebagian baru dimulai (fokus jurus pertama), sebagian sudah tuntas dan diseminasi.
- *Output* berbeda menurut tahap, dari rancangan dan asesmen awal hingga portofolio refleksi dan integrasi ke kelas/ekskul.
- Sosialisasi terkendala terbatasnya waktu konseling klasikal, perlu mandat manajerial (surat tugas, agenda resmi) agar tidak hanya *ad hoc* (tanpa landasan operasional formal).
- Pemahaman substansi Fasda relatif kuat. Beberapa sekolah sudah membuat SOP OJL.
- Monitoring internal berjalan, seperti rapat rutin, borang mandiri, dan pendampingan daring dengan Fasnas.
- Tantangan kunci: manajemen waktu, ketidaksinkronan Bimtek antarwilayah, kebutuhan *coaching* berkelanjutan.
- Prioritas perbaikan: menambahkan alokasi waktu klasikal di kelas, *coaching clinic* tematik, dan forum berbagi praktik baik antar Fasda yang terjadwal.

Pelaksanaan OJL pada Program 7 JBH di berbagai satuan pendidikan menunjukkan dinamika awal yang beragam, sekaligus mengungkap sejumlah titik dan plot yang perlu diperkuat oleh pemangku kebijakan agar dampaknya optimal. Dari keterangan para calon Fasda, waktu pelatihan tatap muka selama empat hari dinilai membantu membangun pemahaman inti, tetapi belum cukup untuk mengonsolidasikan keterampilan fasilitasi dan perangkat asesmen yang diperlukan pada fase OJL. Calon Fasda SMKN 7 Mataram, misalnya, menilai durasi empat hari “terlalu singkat” untuk mematangkan rancangan sesi, uji coba alat, dan simulasi interaksi yang beragam. Kebutuhan *coaching* lanjutan terasa krusial pada minggu-minggu pertama OJL.

Keragaman tahapan implementasi di lapangan juga terlihat jelas. Karena jadwal Bimtek Fasda berbeda antarwilayah, sebagian sekolah baru memasuki OJL dengan fokus pada Jurus 1 (misalnya SMKN 7 Mataram dan SMAN 7 Manado), sebagian lain telah menyelesaikan OJL dan mulai melakukan

diseminasi praktik kepada rekan guru (sejumlah sekolah di Pekanbaru serta SMPN 1 Banjarmasin). Perbedaan tahap ini berdampak pada kedalaman *output* awal yang dapat ditunjukkan, yakni sekolah yang baru memulai OJL cenderung menampilkan bukti berupa rancangan sesi dan jejak asesmen awal, sedangkan sekolah yang telah selesai OJL mulai memiliki portofolio refleksi murid, rencana tindak lanjut, serta contoh integrasi ke kegiatan kelas atau ekstrakurikuler.

Di sisi tata laksana internal, beberapa sekolah melaporkan tantangan penjadwalan untuk sosialisasi materi 7 JBH saat sesi OJL kepada guru lintas mata pelajaran. Keterbatasan jam pertemuan dan padatnya agenda akademik membuat sosialisasi kerap bergantung pada “jam kosong”, seperti disampaikan SMKN 7 Mataram dan SMAN 1 Mataram. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya penguatan mandat manajerial (surat tugas, agenda resmi mingguan/bulanan yang diatur oleh manajemen sekolah) agar diseminasi tidak bersifat *ad hoc* dan meminimalkan beban koordinasi individual Fasda.

Meski demikian, kualitas pemahaman substansi modul awal terbilang menjanjikan. Mayoritas calon Fasda menunjukkan penguasaan kognitif yang baik dan terverifikasi melalui prosedur wawancara yang diawali dengan penentuan dua jurus yang akan di-OJL-kan oleh informan, kemudian pendalaman isi kedua jurus tersebut. Uji ini memperlihatkan kemampuan calon Fasda menjabarkan tujuan, indikator, langkah fasilitasi, serta alat asesmen sederhana untuk memantau ketercapaian. Bukti ini konsisten pada beberapa satuan pendidikan, antara lain SMAN 7 Mataram, SMPN 15 Mataram, SMPN 1 Banjarmasin, dan SMKN 7 Baleendah Kabupaten Bandung, menandakan proses pelatihan berhasil menanamkan kerangka konseptual yang seragam.

Penguatan prosedural mulai tampak melalui inisiatif penyusunan SOP OJL di sejumlah sekolah. Dokumen ini umumnya memuat alur persiapan (perencanaan sesi, penyiapan media/alat), pelaksanaan (waktu, peran, tata tertib), serta pasca-sesi (pengumpulan bukti, refleksi, dan rencana perbaikan). Pada saat yang sama, mekanisme pemantauan internal berjalan dengan variasi yang kreatif. Misal, SMAN 7 Mataram menginstitusikan rapat rutin untuk meninjau progres dan hambatan, sementara SMPN 15 Mataram mengembangkan borang monitoring mandiri dan menjalankan pendampingan mingguan secara *online* bersama Fasnas melalui Google

Meet. Praktik-praktik ini memperlihatkan kesadaran mutu yang tumbuh, di mana dokumentasi, umpan balik terjadwal, dan supervisi jarak jauh dimanfaatkan untuk menjaga konsistensi dan mengakselerasi perbaikan.

Secara keseluruhan, gambaran awal OJL merefleksikan ekosistem yang bergerak ke arah yang tepat, di antaranya pemahaman substansi yang relatif kuat, langkah awal standarisasi melalui SOP, serta sistem monitoring yang cukup baik di tataran satuan pendidikan. Tantangan utama terletak pada manajemen waktu (durasi pelatihan dan sosialisasi), keseragaman tahapan antarwilayah, dan kebutuhan *coaching* berkelanjutan. Intervensi yang paling menjanjikan pada fase berikut ialah penguatan pengaturan waktu di tingkat sekolah, *coaching clinic* tematik pasca-pelatihan, serta pelembagaan forum berbagi praktik yang terjadwal, agar OJL tidak sekadar terlaksana, tetapi tumbuh sebagai budaya pendampingan yang konsisten dan terukur.

B.2. Dampak Awal Program 7 JBH

B. 2. a. Timbulnya Kesadaran Pemda dan Satuan Pendidikan terhadap Urgensi Aktivitas Konseling dan Keberadaan Guru BK

Ringkasan Temuan

Studi dan Kondisi Terdahulu

- Stigma dan minat konseling rendah: Guru BK dipersepsi sebagai “polisi sekolah” dan murid enggan mengakses layanan konseling.
- Dukungan lemah: Perhatian pemerintah terhadap BK dan konseling tidak merata, fasilitas minim, formasi BK kurang.
- Akar persoalan: Rendahnya perhatian sistemik, baik sisi *demand* (minat murid) maupun *supply* (dukungan institusi).

Kondisi Setelah Diintervensi Program

- 7 JBH dan komitmen baru: Kebijakan, pelatihan berjenjang, dan OJL terpantau UPT menggeser metode ceramah ke pendampingan nyata.
- Dampak awal: Partisipasi murid dan *concern* murid terhadap konseling meningkat.
- Dukungan daerah: Integrasi ke perencanaan/APBD, penguatan MGMP BK, serta bantuan BOSDA dan koordinasi lintas-OPD.
- Kesimpulan: 7 JBH mendorong perubahan, tetapi keberlanjutan butuh pendanaan, monitoring, dan penguatan kapasitas yang konsisten.

Di banyak satuan pendidikan, perhatian murid terhadap layanan bimbingan dan konseling (BK) masih rendah karena stigma yang melekat pada figur guru BK. Sejumlah studi mutakhir menunjukkan murid memandang guru BK hanya sebatas pihak yang hanya fokus pada penindakan pelanggaran, sehingga menimbulkan jarak psikologis dan enggan memanfaatkan layanan saat membutuhkan dukungan. Narasi “menakutkan/galak” dan asosiasi layanan dengan hukuman, alih-alih pendampingan perkembangan (Astutik & Dewi, 2022; Wahidah, 2024).

Pada saat yang sama, perhatian dan dukungan pemerintah/ penyelenggara belum merata, tercermin dari lemahnya pengawasan dan prasyarat institusional. Fitriani dkk. (2022) menyoroti minimnya dukungan kebijakan operasional dan manajerial layanan BK di tingkat sekolah/dinas, yang berimplikasi pada kurangnya fasilitas dan penguatan kompetensi berkelanjutan. Kondisi sarana-prasarana juga menjadi indikator perhatian yang belum memadai. Penelitian di Kabupaten Gunungkidul mengungkapkan ketersediaan ruang BK yang jauh dari standar (ruang administrasi, konseling individual, dan kelompok sering tidak tersedia), menegaskan bahwa penyelenggaraan BK belum menjadi prioritas infrastruktur sekolah (Bhakti, 2018). Dalam banyak kasus, bahkan ketersediaan guru BK tidak terpenuhi sehingga peran pendampingan dialihkan ke wali kelas, hal ini menggambarkan kesenjangan perhatian kebijakan terhadap layanan psikopedagogis di tingkat satuan pendidikan (Maleipada dkk., 2025).

Aspek pembiayaan dan penataan formasi tercermin pada rasio guru BK dan murid yang tidak ideal. Aprianti dkk. (2025) melaporkan beban kerja sangat tinggi, misalnya dua guru BK harus menangani lebih dari 900 murid, yang secara langsung menurunkan intensitas pendampingan, menggeser layanan menjadi administratif, dan membuat fungsi preventif/pengembangan sulit dilaksanakan.

Inti persoalan yang tergambar dari temuan studi-studi di atas adalah rendahnya perhatian sistemik terhadap layanan bimbingan dan konseling (BK), baik dari sisi “permintaan” (minat murid) maupun “penyediaan” (dukungan pemerintah atau penyelenggara).

Temuan wawancara dari berbagai informan menunjukkan bahwa Program 7 JBH menjadi sinyal komitmen pemerintah untuk menata ulang iklim konseling dan menguatkan eksistensi guru BK. Pemerintah tidak hanya

menyediakan landasan kebijakan, kerangka kompetensi, dan perangkat pelatihan berjenjang, tetapi juga memantau praktik pendampingan hingga level implementasi melalui UPT-UPT.

"Harapan saya, pelatihan-pelatihan terkait BK dapat diperbanyak. Karena sejatinya guru BK adalah garda terdepan, tapi kadang guru BK dianggap sebelah mata. Apalagi beberapa sekolah, termasuk SMKN 2 Banjarmasin memegang anak-anak inklusi [berkebutuhan khusus], jadi pelatihan terkait BK ini akan sangat diperlukan dan menandakan pemerintah mulai peduli dengan keberadaan BK. Selama ini saya hanya terlibat pelatihan secara umum mengenai bullying atau kekerasan saja, tapi belum pernah benar-benar menyentuh sisi BK nya. Baru di Bimtek ini saja, saya merasakan pelatihan yang benar-benar berkaitan dengan profesi dan peran guru BK" (Calon Fasda SMKN 2 Banjarmasin)

"Dampak positif dari adanya program 7 Jurus BK Hebat dan sosialisasi OJL adalah, murid-murid menjadi lebih mengerti tentang peran dan urgensi BK dan memiliki pengetahuan pengelolaan emosi, dan empati. Kendati perubahannya tidak merata, Fasda tetap selalu mengingatkan untuk tidak terburu nge-judge" (Calon Fasda SMKN 6 Manado)

Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal keberlanjutan Program 7 JBH melalui penguatan kebijakan turunan dan dukungan pembiayaan yang terencana. Langkah pengawalan meliputi integrasi target 7 JBH ke dalam perencanaan daerah serta penganggaran pada APBD melalui program pembinaan satuan pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, dan penguatan layanan BK di sekolah.

"Yang pertama, kebijakan yang kita buat itu adalah penguatan pelatihan di tingkat MGMP Guru BK. Kemudian Pak Wali juga coba mengalokasikan anggaran untuk beberapa kegiatan di MGMP terkait Guru BK dan keberlanjutan program 7 JBH. Karena kalau kita lihat kemarin, peserta yang dikirim untuk pelaksanaan diklat kan belum seluruhnya terpenuhi. Kami juga ingin tahu dan ingin program ini tersampaikan ke seluruh stakeholder, ke seluruh guru-guru BK, tentu dengan bantuan fasnas dan fasda, kemudian kegiatan itu dilaksanakan di tingkat MGMP. Pak Wali sudah memplot untuk kegiatan MGMP ini ada anggarannya, minimal untuk kegiatan makan, minum, dan honor narasumber. Itu instruksi secara langsung dan sudah kita masukkan kedalam RKA kita karena menjadi program prioritas di Pekanbaru." (Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru)

"Dinas Kabupaten Pendidikan Bandung mendukung implementasi 7 Jurus BK Hebat dan layanan BK dalam mendukung kesehatan mental

murid dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Dukungan ini diberikan dalam bentuk memfasilitasi kegiatan dan juga berkoordinasi dengan OPD lain seperti Dinas Komdigi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, komunitas pendidikan, dan korporat serta bantuan BOSDA untuk perbaikan sarana demi mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan.” (Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung)

Kesimpulannya, Program 7 JBH muncul sebagai sinyal kebijakan yang kuat bahwa pemerintah mulai menata ulang ekosistem konseling dan menegaskan kembali posisi strategis guru BK. Rangkaian pelatihan berjenjang yang diikat dengan OJL mendorong praktik pendampingan nyata di kelas, mengisi kekosongan pelatihan yang selama ini “umum” dan belum menyentuh inti profesi BK, sebagaimana diakui para calon Fasda. Dampak awal di sekolah menegaskan pergeseran persepsi murid dan penguatan keterampilan pengelolaan emosi serta empati, meski kecepatan perubahan masih berbeda antardaerah.

Dukungan pemerintah daerah, melalui integrasi program ke perencanaan, penganggaran APBD, dan penguatan MGMP BK, menunjukkan keseriusan untuk memastikan 7 JBH tidak berhenti sebagai proyek pelatihan, tetapi menjadi agenda layanan yang berkelanjutan dan terstandar. Dengan arah kebijakan baru ini, hambatan struktural yang lama menahun mulai diatasi, dan fondasi bagi iklim konseling yang preventif, pengembangan, dan kuratif dibangun lebih kokoh di tingkat satuan pendidikan.

B. 2. b. Apresiasi terhadap Pendekatan Konseling dan ARKA pada Modul 7 JBH

Ringkasan Temuan

- Masalah inti terdahulu: Layanan BK masih didominasi ceramah yang monoton, murid pasif/jenuh, akses ke BK rendah.
- Stigma: BK dipersepsi sebagai “hukuman” sehingga *demand* murid menurun.
- Solusi 7 JBH/ARKA: Sesi ringkas, fokus, interaktif, mengurangi prosedur bertele-tele.
- Fokus potensi murid: Jurusan 1 mengarahkan penemuan diri dan rencana belajar/karier.
- Berbasis data dan teknologi: Asesmen dapat dilakukan via gawai, hasil lebih instan, dan dialog konseling lebih relevan.
- Dampak awal: Keterlibatan meningkat, perencanaan karier lebih jelas, iklim kelas membaik, dan terjadi perubahan perilaku.
- Implikasi: 7 JBH menggeser BK dari pasif/prosedural ke partisipatif, bermakna, dan relevan.

Beberapa riset bertema konseling di Indonesia menunjukkan bahwa praktik layanan konseling di sekolah kerap berjalan dengan pendekatan yang monoton, khususnya dominasi metode ceramah dalam layanan bimbingan klasikal, sehingga pengalaman belajar-konseling menjadi kurang menarik dan daya serapnya rendah. Putri dkk. (2022) membandingkan bimbingan klasikal dengan teknik lain. Mereka mencatat bahwa penggunaan ceramah membuat murid pasif, mudah jenuh, bahkan mengantuk. Beberapa murid sekadar “menulis” tanpa terlibat, atau mengerjakan tugas lain di kelas. Indikasi ini memperlihatkan bahwa pola satu arah tidak memadai untuk membangkitkan atensi, keterlibatan emosi-kognisi, dan internalisasi nilai yang diharapkan dari layanan BK.

Nada serupa tampak pada penelitian yang dilakukan oleh Harumbina dkk. (2022) yang menilai bahwa guru BK “lebih sering” menggunakan metode ceramah dan sesekali menggunakan PowerPoint. Akibatnya, murid menjadi bosan, kurang tertarik, serta tidak memiliki pemahaman memadai tentang layanan BK. Temuan ini menegaskan bahwa masalah bukan semata “apa” materi BK-nya, melainkan “bagaimana” ia disampaikan.

Konsekuensi pedagogis dari metode yang membosankan tampak pada menurunnya minat memanfaatkan layanan BK. Amalia & Wahyumiani (2022) melakukan penelitian tentang minat murid secara eksplisit terhadap layanan BK. Mereka menemukan bahwa rendahnya kunjungan ke ruang BK dan enggan murid mengikuti layanan konseling sebagian dipicu oleh persepsi keliru tentang BK sekaligus pengalaman mengikuti layanan yang tidak menarik. Pratiwi & Darminto (2022) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi minat murid, mulai dari kebutuhan layanan, persepsi terhadap BK, pengaruh teman sebaya, hingga kondisi sarana, berkorelasi dengan kemauan mereka untuk hadir dan terlibat dalam sesi. Ketika kombinasi faktor ini tidak ditata, minat pun tetap rendah. Dengan kata lain, pengalaman layanan yang “terasa” membosankan memperkuat persepsi negatif dan memperlemah *demand* murid terhadap BK.

Secara keseluruhan, kondisi awal yang tergambar dari beberapa studi tersebut adalah ekosistem layanan yang belum cukup menstimulasi partisipasi karena praktik konseling didominasi metode ceramah dan minim inovasi metodologis. Dampaknya, murid jenuh, keterlibatan menurun, dan minat mengakses layanan rendah.

Berdasarkan temuan lapangan, Program 7 JBH menghadirkan nafas baru bagi praktik konseling di satuan pendidikan yang selama ini kerap ditandai pendekatan satu arah, terasa membosankan, dan sulit menyentuh kebutuhan nyata murid. Inti pembaruannya tampak pada cara program ini menata alur layanan menjadi singkat, fokus, dan interaktif, sebagaimana yang dirasakan oleh para calon Fasda di satuan pendidikan masing-masing. Melalui kerangka ARKA (Aktivitas, Refleksi, Konseptual, Aplikasi), sesi konseling dipadatkan menjadi rangkaian pengalaman belajar yang ringkas namun bermakna.

"Alur ARKA menurut saya itu simpel dan mudah dan bikin murid dan guru tidak boring. Pertama kan aktivitas. Kemudian ada refleksi atau konseptual. Dan aplikasi. Kok kayaknya enak ya pakai ini. To the point dan tidak bertele-tele layanan kita. Apalagi layanan BK yang diberikan cuma sekitar 1 jam. Jadi, dengan pakai ini kan gercep begitu, tidak terlalu bertele-tele. Kalau kita nyusun RPL kan panjang dan terlalu banyak, dan kadang terlalu banyak bumbu-bumbunya. Dengan ARKA, saya lupa kemarin waktu pelatihan mau nyampein di Kementerian, untuk guru BK maunya dibikin alur ARKA ini saja deh dengan keterbatasan waktu yang ada." (Calon Fasda SMKN 2 Pekanbaru)

Pernyataan Calon Fasda SMKN 2 Pekanbaru tersebut menangkap dua isu klasik layanan BK, yakni keterbatasan waktu dan kecenderungan prosedur yang bertele-tele. ARKA mereduksi keduanya sekaligus, menjaga esensi pedagogis tanpa mengorbankan kedalaman proses.

Pembaharuan berikutnya adalah orientasi pada kekuatan dan potensi murid sejak awal sesi.

"Sebelum tau jurus ini (Jurus 1 dari Modul 7 JBH), mengenali potensi murid itu penting, tapi dengan jurus 1 ini, rasanya menjadi semakin penting, sehingga kita bisa tau gambaran murid kita dan tau mengarahkannya kemana sesuai potensinya dengan terarah. Murid juga ikut senang mengikuti jurus ini" (Calon Fasda SMPN 15 Mataram)

Pergeseran ini memindahkan fokus dari sekadar penyampaian informasi ke fasilitasi penemuan diri dan perencanaan arah belajar masa depan, yang berpengaruh signifikan pada motivasi intrinsik murid.

Dimensi interaktivitas juga ditopang oleh pemanfaatan teknologi sederhana yang sudah akrab dengan keseharian murid.

"Setiap murid di sini itu bawa hape, saya memanfaatkan hape mereka, saya kasih tautan untuk mereka isi (saat OJL untuk Jurus 1). Jadi kami lebih mudah menganalisis nilai mereka. Asesmen ini sangat membantu,

dan metode ini juga tidak membosankan (tidak boring) bagi murid maupun guru karena interaktif.” (Calon Fasda SMKN 7 Mataram)

Integrasi perangkat gawai dengan praktik modul 7 JBH menjadikan data belajar tersedia cepat, akurat, dan dapat langsung dibahas dalam sesi. Ini mengubah pola konseling dari ceramah menuju dialog berbasis bukti yang relevan secara personal bagi murid.

Dampak awalnya juga terasa pada kualitas keterlibatan dan arah karier.

“Dampak yang paling terasa adalah murid menjadi lebih interaktif dan dapat merencanakan karir mereka dengan lebih baik, terutama dengan penggunaan metode ARKA (Aktivitas, Refleksi, Konseptual, Aplikasi).” (Calon Fasda SMAN 3 Banjarmasin)

Sementara, pada tataran ekosistem kelas, dirasakan juga dampak perubahannya.

“Murid-murid yang tadinya tidak antusias mengikuti layanan BK, sekarang lebih antusias. Kalau hanya materi, mereka cenderung mengantuk, tetapi setelah penerapan OJL, antusiasme meningkat. Terjadi perubahan perilaku: ada murid yang mendatangi saya dan bercerita bahwa ia sudah menerapkan Jurus 4 agar tidak lagi terlambat.” (Calon Fasda SMPN 1 Banjarmasin)

“Program 7 Jurus dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru. Anak-anak juga mendapat wawasan yang sangat membantu mental, intelektual, dan diri mereka. Iklim kelas lebih positif, terjalin hubungan komunikatif antara guru dan murid, dan suasana konseling lebih hidup.” (Calon Fasda SMAN 9 Manado)

Dengan demikian, 7 JBH tidak sekadar menawarkan materi baru, melainkan merombak pengalaman layanan, yakni dari pasif menjadi partisipatif, dari prosedural menjadi bermakna, dan dari membosankan menjadi relevan sehingga membuka ruang bagi konseling yang singkat, tajam, dan berdampak pada kesejahteraan mental dan psikologis serta arah belajar murid.

Kesimpulannya, akar persoalan layanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah terletak pada praktik yang didominasi ceramah satu arah sehingga pengalaman konseling menjadi monoton, daya serap rendah, dan minat murid mengakses layanan menurun. Temuan-temuan tersebut berkelindan dengan persepsi keliru tentang BK dan keterbatasan implementasi di kelas. Dalam konteks ini, Program 7 JBH menghadirkan “nafas baru” dengan menata sesi

secara ringkas, fokus, dan interaktif melalui kerangka ARKA (Aktivitas, Refleksi, Konseptual, Aplikasi). Alur ini selaras dengan keterbatasan durasi layanan ± 1 jam yang terjadi di beberapa satuan pendidikan, mengurangi prosedur bertele-tele tanpa mengorbankan kedalaman proses, serta menggeser praktik dari transfer informasi menjadi pengalaman belajar partisipatif. Pemanfaatan gawai dan tautan asesmen membuat data cepat tersedia untuk dibahas, mengubah konseling menjadi dialog berbasis bukti yang relevan bagi setiap murid. Dampak awal di lapangan menunjukkan peningkatan interaktivitas, kejelasan perencanaan karier, serta iklim kelas yang lebih positif dan komunikatif. Ke depan, keberhasilan 7 JBH memerlukan pengawalan berkelanjutan melalui penguatan kompetensi, integrasi dalam perencanaan sekolah/daerah, pemenuhan sarana BK, perbaikan rasio guru BK dan murid, serta monitoring OJL agar praktik baik meluas dan berkelanjutan.

B. 2. c. Menumbuhkan Inovasi Baru Metode Konseling di Satuan Pendidikan

Ringkasan Temuan

- 7 JBH menyegarkan praktik BK: Sesi lebih singkat, fokus, interaktif.
- ARKA jadi kerangka ringkas dan bermakna.
- Inovasi: Teknologi AkuPintar untuk TKA dengan hasil instan, dialog berbasis data, beban guru turun.
- Kesejahteraan psikologis: *Mood tracker* dan *jurnal syukur* untuk literasi emosi/regulasi diri.

Program 7 JBH menawarkan pembaruan cara pandang dan praktik terhadap layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Bukan sekadar menyediakan materi, 7 JBH menata ulang pengalaman konseling agar lebih singkat, fokus, interaktif, dan berdampak. Kerangka kerja seperti ARKA (Aktivitas, Refleksi, Konseptual, Aplikasi) mendorong sesi yang berorientasi pada pengalaman belajar, refleksi bermakna, peneguhan konsep, lalu penerapan praktis kepada murid. Alur Bimtek hingga OJL juga memberi ruang aman bagi guru, khususnya Fasda, untuk bereksperimen, memodifikasi, dan mereplikasi strategi sesuai karakteristik sekolah dan murid. Dengan kata lain, 7 JBH bukan hanya memperkaya wawasan, tetapi juga menggerakkan

kultur inovasi. Guru terdorong mencoba pendekatan yang lebih partisipatif, multimodal, dan berbasis data. Murid diharapkan terlibat aktif, bukan sekadar menjadi penerima informasi. Dampaknya, praktik konseling yang sebelumnya cenderung satu arah dan melelahkan secara atensi berubah menjadi pengalaman yang relevan, menyenangkan, dan mudah dirasakan manfaatnya di kelas.

Temuan studi lapangan menunjukkan pola pembaruan tersebut hadir melalui integrasi metode konseling dengan teknologi yang dekat dengan keseharian murid.

"Dampak yang paling terasa dari OJL adalah pembelajaran dengan metode ARKA, dikombinasikan dengan aplikasi karya sekolah kami, AkuPintar, yang memudahkan anak-anak melaksanakan TKA (Tes Kemampuan Akademik) dan memilih ekstrakurikuler yang mereka inginkan. Saat menggunakan AkuPintar, hasil tes langsung muncul otomatis di layar handphone anak-anak, jadi tidak perlu menunggu guru menginput terlebih dahulu. Berkat aplikasi ini, beban kerja guru menjadi lebih ringan karena tinggal mengarahkan anak-anak untuk mengikuti TKA." (Calon Fasda SMKN 2 Banjarmasin)

Kutipan langsung dari hasil wawancara tersebut memperlihatkan dua penjelasan. *Pertama*, ARKA menata alur layanan konseling agar tepat sasaran dalam durasi singkat dan efektif, sehingga sesi tidak bertele-tele, tetapi tetap memiliki kedalaman pedagogis. *Kedua*, pemanfaatan aplikasi asesmen membuat umpan balik tersedia seketika, membuka kesempatan bagi guru dan murid untuk berdialog berdasarkan data yang relevan secara personal. Perpaduan keduanya menggeser konseling dari ceramah menuju percakapan berbasis bukti. Murid memahami profil akademiknya lebih cepat, guru dapat memfasilitasi pengambilan keputusan (misalnya pemilihan ekstrakurikuler atau strategi belajar) dengan lebih tepat, sementara beban administratif menurun karena proses input dan rekapitulasi terjadi otomatis. Selain efisiensi, pendekatan ini juga meningkatkan keterlibatan, yakni ketika hasil tes muncul langsung di gawai mereka, murid terdorong bertanya, membandingkan, dan merencanakan tindak lanjut, sebuah tanda bahwa konseling mulai hidup sebagai proses belajar, bukan sekadar kegiatan penyampaian materi.

Inovasi yang sama baiknya tampak pada ranah kesejahteraan psikologis melalui kegiatan pemantauan emosi dan pembiasaan reflektif.

"Kami membuat sebuah inovasi yakni Mood Tracker untuk setiap anak, yaitu dalam satu kertas kami buat 30 kotak yang mewakili 30 hari, dan setiap hari mereka mewarnai kotak sesuai kondisi perasaan saat itu. Warnanya bebas namun konsisten, misalnya cerah untuk gembira, lembut untuk tenang, dan lebih gelap untuk hari yang menantang, sehingga dalam sekejap kami bisa melihat pola emosi harian mereka. Bersama dengan itu, anak-anak mengisi Jurnal Syukur di buku masing-masing. Setiap hari mereka menulis satu hal yang membuat mereka bersyukur, lalu kami rekap setiap 30 hari untuk melihat perkembangan kebiasaan reflektif dan cara mereka memaknai pengalaman belajar. Program sederhana namun berdampak ini hadir setelah intervensi Program 7 Jurus BK Hebat. Inspirasi dari 7 Jurus mendorong kami menata kegiatan pendampingan yang ringkas, bermakna, dan mudah dijalankan di kelas. Dengan mood tracker, kami, guru dan murid, lebih peka membaca emosi, dengan jurnal syukur, anak-anak belajar mengelola perasaan dan menjaga perspektif positif. Hasilnya, sesi konseling dan pembelajaran terasa lebih hidup, komunikatif, dan berpusat pada kesejahteraan murid, bukan hanya pada penyampaian materi." (Calon Fasda SMAN 1 Bojongsoang Kabupaten Bandung)

Praktik yang tergambar dari kutipan wawancara dengan Calon Fasda SMAN 1 Bojongsoang tersebut menunjukkan bagaimana substansi 7 JBH yang menekankan penumbuhan kebiasaan baik, literasi emosi, dan penguatan karakter diterjemahkan menjadi aktivitas sederhana, murah, tetapi sistematis. **Mood tracking** harian menciptakan jejak data emosi yang mudah dibaca pola-polanya. Guru dapat mengidentifikasi hari-hari atau situasi pemicu emosi, sementara murid belajar menamai, menerima, dan menata respons emosinya. **Jurnal syukur** menambah dimensi regulasi diri dengan melatih fokus pada hal-hal positif, meningkatkan *sense of agency*, dan memperkuat resiliensi di tengah tuntutan akademik. Jika sebelumnya sesi konseling rawan menjadi formalitas, kombinasi dua praktik ini mengubahnya menjadi ruang pengelolaan emosi lebih konsisten, terukur, dan bermakna.

Dari dua contoh sebelumnya, tampak bahwa 7 JBH memantik inovasi pada dua lini utama; (1) pengambilan keputusan akademik yang berbasis data dan (2) penguatan sosial-emosional yang berorientasi kebiasaan. Keduanya saling melengkapi. Asesmen cepat melalui aplikasi membantu murid dan guru menyepakati langkah belajar yang realistis dan personal, **mood tracker** dan **jurnal syukur** menjaga kebugaran psikologis yang diperlukan agar rencana belajar dijalankan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, inovasi pasca-7 JBH berpotensi memperbaiki ekosistem konseling secara sistemik. Ketika guru terbiasa memfasilitasi dialog berbasis data dan emosi, persepsi murid terhadap layanan BK ikut bergeser: dari “ruang sanksi” menjadi “ruang tumbuh”. Ketika praktik ini terdokumentasi melalui portofolio OJL, satuan pendidikan memiliki bahan untuk supervisi, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan, sementara dinas dan UPT dapat memetakan pola praktik baik untuk disebarluaskan. Dengan demikian, 7 JBH bukan hanya menghasilkan variasi metode, tetapi juga membangun rantai nilai inovasi yakni pelatihan, uji coba di lapangan, bukti praktik, replikasi dan peningkatan. Alur inilah yang pada gilirannya meneguhkan konseling sebagai bagian inti ekosistem pembelajaran yang aman, nyaman, dan menggembirakan serta relevan bagi kebutuhan nyata murid masa kini.

B.3.Hambatan dan Tantangan Implementasi Program 7 JBH (Sesi OJL)

B. 3. a. Beberapa Kendala pada Sesi OJL

Ringkasan Temuan

- Tidak ada sesi klasikal resmi: OJL dilakukan pada “jam kosong”; sosialisasi ke guru lain minim.
- Kapasitas terbatas: Kuota Fasda tidak sebanding jumlah murid, waktu sempit (bahkan ada yang hanya 1 JP/minggu) membatasi implementasi ARKA.
- Sarpras dan monitoring terkendala: Listrik/proyektor bermasalah. Di beberapa sekolah monitoring belum berjalan karena OJL masih sangat awal dilaksanakan.
- Hambatan sosial: Fasda sungkan menyosialisasikan ke guru senior sehingga legitimasi peran lemah.

Gambaran awal pelaksanaan OJL menunjukkan bahwa sebagian Fasda menghadapi hambatan struktural dan kultural yang berpengaruh langsung pada mutu dan jangkauan implementasi. Di beberapa satuan pendidikan, format layanan klasikal BK belum terinstitusi sebagai jam pelajaran yang terjadwal, sehingga OJL berjalan mengandalkan “jam kosong” di kelas.

“Banyak guru BK yang juga peserta Bimtek Calon Fasda tidak memiliki sesi klasikal di kelas, sehingga mereka hanya memanfaatkan jam kosong di sekolah. Akibatnya, proses OJL terkendala dan sosialisasi kepada para guru kurang masif.” (BGTK Provinsi Sulawesi Utara)

Ketiadaan sesi klasikal atau jam resmi untuk guru BK ini membuat konsistensi pertemuan, kelengkapan kehadiran murid, dan kesinambungan materi sulit dijaga, sekaligus membatasi ruang berbagi praktik kepada rekan guru lintas mata pelajaran.

Kondisi tersebut tercermin di SMPN 7 Manado, di mana calon Fasda belum melakukan sosialisasi 7 JBH kepada guru lain. Indikasinya tampak dari ketidaktahuan sejumlah guru tentang substansi program, menandakan perlunya intervensi kebijakan Dinas dan satuan pendidikan terkait agar diseminasi tidak bergantung pada inisiatif personal. Pada saat yang sama, sisi keterbatasan SDM juga mempengaruhi kelancaran OJL. Di SMKN 2 Banjarmasin, kuota calon Fasda yang mengikuti Bimtek tidak sebanding dengan jumlah murid yang harus dilayani, sehingga calon Fasda tersebut kewalahan saat OJL. Ketidakselarasan antara kapasitas fasilitator dan beban pendampingan membuat beberapa komponen OJL (asesmen, tindak lanjut, dokumentasi) berisiko tidak tuntas atau tertunda.

Hambatan terkait sarana prasarana menjadi faktor penghambat lain. SMKN 7 Mataram melaporkan keterbatasan fasilitas saat sesi OJL, dan pada saat wawancara lapangan, pihak sekolah menyebut program OJL baru berjalan satu minggu sehingga monitoring khusus belum dilakukan.

"Karena baru berjalan seminggu, belum ada monitoring khusus dari kami, biasanya monitoring dilakukan di pertengahan." (Kepala Sekolah SMKN 7 Mataram)

Temuan ini menandakan bahwa pengawasan mutu memerlukan *lead time* serta perangkat kontrol yang siap pakai (borang harian, jadwal supervisi, dan indikator ketercapaian). Di SMAN 3 Banjarmasin, kendala teknis seperti listrik padam atau proyektor yang tidak berfungsi mengganggu kontinuitas sesi. Hal-hal teknis seperti ini tampak remeh, tetapi berdampak pada ritme ARKA dan kualitas interaksi yang menjadi ciri pembelajaran konseling 7 JBH.

Dimensi durasi implementasi OJL juga menonjol sebagai kendala lintas lokasi. SMAN 9 Manado menyebut keterbatasan waktu sebagai penghalang, sementara SMPN 1 Banjarmasin hanya memperoleh alokasi satu jam pelajaran per minggu untuk layanan, yang praktis menyempitkan ruang eksplorasi aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi dalam kerangka ARKA.

Tak kalah penting, hambatan sosio-psikologis turut mengemuka. Di SMKN 2 Baleendah, seorang calon Fasda menyampaikan kegamangan saat hendak menyosialisasikan materi kepada guru lain, khususnya yang lebih senior.

"Saat mensosialisasikan ke guru lain di sekolah, kekhawatiran saya adalah mereka melihat saya bukan sebagai pemateri, melainkan sekadar rekan yang dikenal secara pribadi. Saya takut hal itu membuat materi sosialisasi diremehkan, terutama oleh guru-guru yang lebih senior." (Calon Fasda SMKN 2 Baleendah)

Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa selain perangkat teknis, positioning Fasda juga membutuhkan dukungan simbolik dan struktural dari pimpinan sekolah, mulai dari penyebutan resmi sebagai narasumber internal, hingga ruang formal dalam agenda pengembangan sekolah.

Jika ditarik, pola kendala di atas menandai tiga hal yang saling terkait. *Pertama*, ketiadaan institusionalisasi sesi klasikal menghambat konsistensi dan visibilitas OJL. Tanpa jam yang terjadwal, OJL cenderung sporadis dan sukar didokumentasikan dengan baik. *Kedua*, keterbatasan sarana-prasarana dan dukungan teknis mengganggu pengalaman belajar-konseling yang seharusnya interaktif, kerangka ARKA membutuhkan instrumen yang memadai agar aktivitas dapat mengalir. *Ketiga*, kesenjangan kapasitas dan otoritas fasilitator, baik dari sisi jumlah Fasda terhadap populasi murid, maupun pengakuan formal di hadapan kolega, mempengaruhi jangkauan sosialisasi dan percepatan sosialisasi praktik baik.

Meski demikian, hambatan-hambatan ini juga memberi pelajaran desain yang jelas. Di tingkat sekolah, penetapan sesi klasikal BK terjadwal per kelas, penerbitan surat tugas sosialisasi bagi Fasda, dan penyusunan SOP OJL akan memperkuat legitimasi dan ritme kerja. Di tingkat teknis, inventarisasi sarpras minimum (listrik, proyektor, papan tulis/lembar kerja cetak) beserta rencana keberlanjutan akan menjaga kualitas sesi OJL. Sementara itu, keselarasan kuota pelatihan Fasda dengan rasio murid perlu menjadi perhatian dinas/UPT agar beban pendampingan realistis. Mengatasi minimnya sesi klasikal, memperbaiki sarpras, dan menata dukungan sosial-institusional bukan sekadar urusan logistik, ketiganya adalah prasyarat agar OJL 7 JBH hadir sebagai pengalaman konseling yang konsisten, interaktif, dan bermakna bagi seluruh pihak.

B. 3. b. Proses Monitoring Terkendala Koordinasi Antarlembaga dan Pembiayaan

Ringkasan Temuan

- Monitoring antarinstansi sekolah, dinas pendidikan, BGTK belum terjaln.
- Di Provinsi Sulawesi Utara, dinas pendidikan menyerahkan monitoring ke BGTK. Pemantauan OJL mayoritas dilakukan secara daring karena keterbatasan biaya.
- Di Kota Pekanbaru monitoring belum berjalan, komunikasi BGTK lemah, sekolah merasa “jalan sendiri”.
- Banyak dinas pendidikan tidak turun lapangan untuk melakukan monitoring sehingga validasi bukti lemah, standar mutu tak seragam.
- Akar kendala: Pembiayaan minim, koordinasi peran dinas pendidikan dan BGTK tidak jelas, sinkronisasi waktu/komunikasi lemah.
- Dampak: Kesenjangan mutu OJL melebar; Praktik baik sulit ditransfer.

Pada tahap implementasi awal OJL Program 7 JBH, mekanisme monitoring idealnya berjalan berlapis, yakni sekolah memastikan mutu pelaksanaan harian, dinas pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan, sementara BGTK juga berpartisipasi dalam penjaminan mutu serta dukungan teknis. Namun, temuan lapangan memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan ini belum bekerja secara terpadu. Hambatan biaya perjalanan dinas, keterbatasan waktu, serta komunikasi antarlembaga yang belum berjalan dengan lancar menyebabkan monitoring cenderung terfragmentasi dan tidak seragam antardaerah.

Di Sulawesi Utara, *role sharing* pengawasan bergeser hampir sepenuhnya kepada BGTK. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Kota Manado belum melaksanakan monitoring langsung. Menurut mereka, seluruh pantauan diserahkan kepada BGTK.

“Seluruh proses monitoring OJL semua dipantau oleh BGTK, Dinas hanya fokus untuk merekomendasikan peserta Bimtek saja.” (Dinas Pendidikan Kota Manado).

Di sisi lain, BGTK sendiri lebih banyak melakukan monitoring secara daring karena terkendala pembiayaan untuk kunjungan lapangan, sehingga data yang dihimpun cenderung berupa laporan daring mandiri sekolah/Fasda dan proses dari pertemuan daring. Pola ini membatasi kedalaman observasi

lapangan secara langsung dan memperlambat umpan balik berbasis temuan langsung di lapangan.

Kondisi yang sama juga ditemui di Kota Pekanbaru. Di SMAN 10 Pekanbaru, monitoring pelaksanaan OJL belum berjalan karena sekolah masih pada tahap persiapan. Hal ini mengindikasikan kebutuhan *lead time* yang lebih jelas antara pelatihan, perencanaan sesi, dan awal OJL. Pada level UPT, muncul penilaian bahwa BGTK Pekanbaru kurang komunikatif dalam monitoring. Berdasarkan temuan wawancara, Fasda di sekolah merasa “berjalan sendiri-sendiri” tanpa ada pemantauan dari unsur Pemda. Pola komunikasi yang kurang baik berimplikasi pada hilangnya ritme perbaikan praktik OJL berkelanjutan, karena isu teknis dan pedagogis tidak segera dipotret, dibahas, dan diselesaikan dalam forum lintas pemangku kepentingan di tataran daerah.

Beberapa dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi di lokasi lain juga tidak melakukan monitoring langsung. Ketidadaan kunjungan atau telaah periodik berdampak pada lemahnya validasi bukti OJL (misalnya kehadiran, bukti asesmen, dan rencana tindak lanjut), serta mengurangi tekanan positif untuk standardisasi mutu antarsekolah. Di tingkat sekolah, situasi ini berpotensi menurunkan motivasi dan akuntabilitas karena capaian tidak dikaitkan dengan *feedback* formal dari Pemda (dinas pendidikan dan BGTK).

Secara substansial, hambatan monitoring bisa disimpulkan dalam tiga hal. *Pertama*, pembiayaan. Tanpa dukungan biaya perjalanan yang memadai, siklus monitoring secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan secara berkala, padahal observasi langsung penting untuk memvalidasi praktik ARKA, kualitas interaksi, dan pemanfaatan instrumen asesmen. *Kedua*, koordinasi antar lembaga. Batas peran dinas pendidikan dan BGTK belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan. Ketika Dinas hanya berperan pada fase rekomendasi peserta dan tidak masuk ke pengawasan pelaksanaan, *checks and balances* mutu melemah. *Ketiga*, sinkronisasi waktu dan kanal komunikasi. Jadwal sekolah yang padat, perbedaan pelaksanaan Bimtek antarwilayah, serta belum adanya forum lintas pemangku kepentingan yang rutin membuat isu implementasi mengendap tanpa resolusi cepat.

Dampak dari situasi tersebut nyata pada mutu OJL. Tanpa monitoring lapangan yang memadai, kesenjangan antarsekolah melebar. Sebagian

satuan pendidikan bergerak dinamis, sementara yang lain tertahan di tahap persiapan atau menjalankan OJL dengan intensitas minimal. Praktik baik sulit terekspose sebagai percontohan bagi yang lain karena tidak terdokumentasi dan tidak dibahas antara jejaring satuan pendidikan.

Temuan-temuan tersebut mengisyaratkan kebutuhan penataan ulang ekosistem monitoring secara cepat namun terukur. Pada tataran tata kelola, klasifikasi pembagian peran dinas pendidikan dan BGTK dan penganggaran minimal untuk kunjungan sampling perlu diinstitusikan agar triangulasi data (laporan LMS, bukti OJL, dan observasi kelas) berjalan. Pada tataran operasional, memadukan monitoring daring dan kunjungan terbatas serta format monitoring yang seragam akan memperkuat konsistensi pelaporan dan kecepatan umpan balik dari para *stakeholders*. Dengan demikian, kendala pembiayaan dan koordinasi tidak lagi menjadi *bottleneck*, melainkan terkelola melalui desain monitoring yang realistis, kolaboratif, dan berfokus pada mutu pelaksanaan di tataran satuan pendidikan.

C. Gambaran Implementasi Kebijakan Guru Wali di Sekolah

C.1. Mayoritas Sekolah Sudah Menerbitkan SK Guru Wali

Ringkasan Temuan

- Mayoritas sekolah sudah menerbitkan SK Guru Wali, kecuali satu sekolah di Kota Mataram yang menjadi sampel studi (menunggu instruksi dinas).
- Contoh praktik: SMAN 10 Pekanbaru (semua guru jadi wali, kecuali kepek), SMPN 15 Mataram (rasio kurang lebih 19-21 murid per guru, SOP dan pertemuan berjalan), SMPN 3 Baleendah (jadwal bulanan dan ekuivalensi JP bagi guru).
- Fungsi SK: menjadi dasar legal-administratif untuk penugasan, penjadwalan, pengaturan rasio, serta pencatatan, monitoring dan evaluasi.
- Peran guru wali di sekolah bervariasi mulai dari tahap sosialisasi hingga sudah punya SOP dan jadwal kegiatan rutin.

Hasil temuan studi lapangan menunjukkan bahwa mayoritas satuan pendidikan di lokasi studi telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan guru wali. SK ini terbit di sekolah-sekolah pada klaster Pekanbaru (SMPN 9,

SMKN 2, SMAN 10), Manado (SMPN 7, SMKN 6, SMAN 9), Banjarmasin (SMPN 1, SMKN 2, SMAN 3), serta Kabupaten Bandung (SMPN 3 Baleendah, SMKN 02 Baleendah, SMAN 1 Bojongsoang), juga di Mataram (SMPN 15 dan SMAN 1). Satu-satunya sekolah yang belum menerbitkan SK Guru Wali adalah SMKN 7 Mataram. Pihak sekolah menyatakan masih menunggu arahan dari dinas setempat. Temuan ini menegaskan bahwa penerbitan SK telah menjadi arus utama praktik awal implementasi peran guru wali di sekolah-sekolah yang menjadi sampel studi kali ini.

"Belum ada SK guru wali karena belum ada instruksi dari dinas. Sekolah masih mengandalkan peran wali kelas yang mengurus murid dari awal hingga lulus... sekolah masih menunggu arahan resmi dari dinas." (Kepsek SMKN 7 Mataram)

"Di SMAN 10 Pekanbaru, semua guru ditetapkan sebagai guru wali kecuali kepala sekolah. Penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk SK resmi... dipilih karena jumlah murid yang banyak sehingga diperlukan penyesuaian rasio guru wali." (Kepsek SMAN 10 Pekanbaru)

"Kebijakan Guru Wali sudah dilaksanakan, sudah ada pembagian guru wali dengan murid binaan sekitar 19-21 murid per guru... sudah ada SOP yang jelas dan pertemuan guru wali dengan murid telah terjadi." (Kepsek SMPN 15 Mataram)

"Sudah ada SK Guru Wali... hampir semua guru mendapat peran sebagai guru wali... ada jadwal rutin perwalian satu bulan sekali dan ekuivalensi jam dimasukkan dalam beban kerja guru." (Kepsek SMPN 3 Baleendah)

Secara substantif, penerbitan SK merupakan langkah awal yang penting. SK memberi landasan legal dan administratif bagi penugasan pendampingan, membuka ruang penjadwalan perwalian, memperjelas rasio guru dan murid binaan, serta memudahkan pencatatan, monitoring, dan evaluasi. Meski tingkat pemahaman dan kedalaman pelaksanaan masih beragam antar sekolah (sebagian masih pada tahap sosialisasi, sebagian sudah memiliki SOP dan jadwal pertemuan rutin), SK menjadi prasyarat kelembagaan untuk memastikan peran guru wali tidak sekadar wacana, melainkan tertanam dalam tata kelola sekolah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun proses implementasi peran guru wali berbeda-beda, legalisasi peran melalui SK telah berjalan luas dan menjadi pijakan untuk melangkah ke tahapan berikutnya, yaitu penataan

rasio dan jadwal, penyusunan SOP, penguatan kompetensi, serta penguatan mekanisme pelaporan. Dengan demikian, capaian awal ini patut diapresiasi sebagai fondasi kelembagaan bagi penguatan pendampingan murid melalui peran guru wali di satuan pendidikan.

C.2. Beberapa Sekolah Belum Memahami Tugas dan Peran Guru Wali

Ringkasan Temuan

- Banyak sekolah sudah menerbitkan SK guru wali, tetapi pemahaman tugas dan peran belum merata. Banyak sekolah masih melihat guru wali sebagai penunjukan administratif, bukan peran pendampingan menyeluruh.
- Kesenjangan legal-operasional: Belum memiliki jadwal baku, ekuivalensi jam, SOP, dan pencatatan, sehingga layanan tidak konsisten/terukur.
- Contoh kasus: SMAN 10 Pekanbaru (belum ada Bimtek), SMPN 7 dan SMKN 6 Manado (guru belum memahami peran dan belum memiliki jadwal), SMKN 2 Banjarmasin (SK cenderung formalitas), SMAN 1 Mataram (belum memiliki jadwal dan dokumentasi).
- Dampak: Akuntabilitas dan kesinambungan pendampingan melemah, masalah murid tetap lari ke mekanisme lama (wali kelas/konseling individual).

Meskipun mayoritas satuan pendidikan pada lokasi studi telah menerbitkan SK penetapan guru wali, sebagaimana yang sudah dipaparkan pada subbab sebelumnya, tetapi kedalaman pemahaman terhadap mandat dan praktiknya masih beragam. Pada sejumlah sekolah, guru wali dipahami sebatas penunjukan administratif tanpa diikuti kejelasan tugas pembimbingan akademik, pengembangan karakter, serta dukungan sosial dan emosional yang harus berlangsung secara berkelanjutan dan kolaboratif dengan Guru BK serta wali kelas sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan terbaru. Ketidakselarasan ini tampak ketika penetapan formal belum diiringi jadwal, ekuivalensi jam, ataupun prosedur layanan yang baku di tingkat sekolah.

Contoh paling terang terlihat di SMAN 10 Pekanbaru. Seluruh guru (kecuali kepala sekolah) telah ditetapkan sebagai guru wali melalui SK, tetapi pihak kurikulum menyatakan belum ada bimtek /sosialisasi, sehingga pemahaman yang berkembang baru sebatas pembagian tugas. Kondisi ini menandakan adanya jurang antara legalitas dan kapasitas implementasi pada level guru.

Di Manado, SMPN 7 melaporkan bahwa program guru wali masih sangat baru. Semua guru diwajibkan menjadi guru wali, tetapi banyak guru "masih belum tahu," dan penanganan masalah murid tetap diarahkan melalui wali kelas. Artinya, peran guru wali belum benar-benar diintegrasikan ke dalam tata kelola pendampingan harian murid. Di SMKN 6 Manado, sudah ada SK, tetapi tidak disertai jadwal. Sekolah lebih memaksimalkan layanan konseling individual sesuai permintaan dari murid. Ketiadaan pengaturan waktu dan alur kerja yang spesifik untuk guru wali memperlihatkan bahwa fungsi pendampingan longitudinal belum diinstitusikan.

Temuan studi lapangan di Banjarmasin memperkuat pola tersebut. Di SMKN 2 Banjarmasin, kepala sekolah telah menerjemahkan aturan dan menerbitkan SK, tetapi pengangkatan dinilai hanya bersifat formalitas karena dorongan input data ke Dapodik. Secara substansi kepala sekolah dan guru-guru masih banyak yang belum memahami fungsi guru wali, sehingga tugasnya belum dipraktekkan secara optimal (sebagian guru wali juga merangkap guru BK). Kondisi ini menegaskan bahwa pemaknaan peran belum menyentuh desain layanan dan indikator kinerjanya di kelas.

Di sisi lain, SMAN 1 Mataram telah menyusun SK, tetapi pelaksanaannya tetap fleksibel tanpa jadwal baku atau pencatatan berkala, sehingga pendampingan sulit dimonitor dan dievaluasi. Ketiadaan struktur waktu dan dokumentasi ini menghambat akuntabilitas dan kesinambungan pendampingan murid.

"Peran Guru Wali belum memiliki jadwal baku maupun ekuivalensi jam yang terstruktur... jadwal temu/pendampingan tidak tercatat secara rutin dalam kalender resmi sekolah." (Kepsek SMAN 1 Mataram)

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa sebagian pihak di sekolah masih memahami guru wali sebagai "label penugasan", belum sebagai peran pendampingan yang menuntut alur layanan, jadwal, instrumen asesmen sederhana, serta kolaborasi struktural. Agar mandat kebijakan tercapai, penerbitan SK perlu diikuti program penguatan kapasitas dan penataan operasional, seperti membuat jadwal perwalian, ekuivalensi jam, format pencatatan, serta forum koordinasi rutin dengan guru BK/wali kelas. Dengan langkah tersebut, peran guru wali akan bertransformasi dari sekadar nomenklatur menjadi praktik pendampingan yang nyata dan terukur sesuai arah kebijakan.



Rekomendasi Kebijakan

Studi ini memotret implementasi program 7 Jurus BK Hebat (7 JBH) dan kebijakan guru wali pada tahap awal implementasi. Meskipun baru hitungan bulan mulai diterapkan oleh satuan pendidikan, temuan lapangan menunjukkan beberapa respons positif. Pada studi-studi sebelumnya, guru BK kurang mendapat perhatian dan baru dibutuhkan ketika terjadi kasus tertentu. Studi ini menunjukkan, *pertama*, melalui intervensi program 7 JBH, mulai timbul kesadaran guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan terkait urgensi konseling dan pentingnya peran guru BK. *Kedua*, pendekatan konseling melalui ARKA yang dipelajari melalui modul 7 JBH mendapat respons positif karena dinilai lebih ringkas, partisipatif, bermakna, dan relevan. *Ketiga*, hasil pelatihan mendorong tumbuhnya inovasi dalam melaksanakan konseling di sekolah. Beberapa sekolah memadukan hasil pelatihan dengan inovasi untuk memahami dan mengelola minat, bakat, maupun emosi murid. *Keempat*, terkait kebijakan guru wali, sekolah-sekolah meresponsnya dengan membuat SK sebagai dasar melaksanakan kebijakan tersebut.

Namun demikian, terdapat ruang perbaikan yang perlu terus ditingkatkan agar program 7 JBH dan kebijakan guru wali dapat berjalan optimal. *Pertama*, pelaksanaan OJL pelatihan 7 JBH belum sepenuhnya mendapat dukungan dan terlembaga di sekolah. Hal ini menyebabkan calon Fasda kesulitan melaksanakan praktik dari hasil pelatihan. Selain itu, terdapat pula masalah peran dan kedudukan calon Fasda di sekolah yang menyulitkan mereka melakukan sosialisasi kepada guru lainnya. *Kedua*, kendala pada mekanisme monitoring yang idealnya dapat dilakukan oleh dinas pendidikan maupun UPT Kemendikdasmen di daerah dalam memantau implementasi 7 JBH. Masalah koordinasi antarinstansi, pembagian peran, serta minimnya anggaran pendukung menjadi penyebab belum optimalnya monitoring yang dilakukan. *Ketiga*, implementasi kebijakan guru wali baru sebatas penetapan SK dan belum dilengkapi dengan penegasan pembagian peran, penentuan

jadwal, ekuivalensi JP, serta belum memiliki SOP yang jelas sehingga implementasinya belum konsisten dan terukur.

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, pada bab ini dirumuskan beberapa rekomendasi yang difokuskan pada para pemangku kepentingan kunci. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan implementasi 7 JBH dan peran guru wali ke depan tidak hanya bersifat *ad hoc*, melainkan terlembaga, terukur, dan berkelanjutan.

A. Rekomendasi untuk Kemendikdasmen (Ditjen GTKPG)

Terkait OJL 7 JBH

Pertama, memperkuat desain pelatihan dan pendampingan OJL. Penguatan desain pelatihan bisa berupa perluasan skema Bimtek dari 4 hari menjadi paket berjenjang (pelatihan inti, *coaching clinic* tematik, *refreshment*).

Kedua, standarisasi perangkat pengawasan mutu OJL. Pengawasan mutu OJL bisa berupa penerbitan perangkat implementasi dan pengawasan OJL yang terstandarisasi dalam skala nasional seperti SOP OJL, borang monitoring, dan *template* rencana implementasi OJL.

Terkait Guru Wali

Pertama, kebijakan rasio dan beban kerja, yakni berupa penegasan terhadap pengaturan rasio layanan BK-murid yang wajar beserta penegasan ekuivalensi jam untuk guru wali di seluruh satuan pendidikan.

Kedua, optimalisasi sosialisasi tugas dan kewajiban guru wali. Oleh karena sebagian pendidik dan tenaga kependidikan belum memahami peran mereka sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka diperlukan penguatan salah satunya melalui penyusunan buku saku atau panduan ringkas tentang peran, hak, dan kewajiban guru wali yang mudah diakses dan dipahami.

B. Rekomendasi untuk UPT Kemendikdasmen di Daerah

Terkait OJL 7 JBH

Pertama, melakukan monitoring hibrida yang terjadwal. UPT daerah bisa melakukan monitoring OJL secara daring melalui fitur-fitur digital

seperti WA, Zoom, dan Gmeet, dan luring melalui kunjungan langsung ke satu pendidikan yang sedang dalam tahap OJL. Melalui mekanisme hibrida, laporan monitoring bisa lebih holistik dan kaya daripada hanya melalui mekanisme salah satu saja (daring atau luring).

Kedua, koordinasi lintas lembaga. UPT memfasilitasi rapat koordinasi bulanan dengan dinas prov/kab/kota dan MKKS/MGMP BK untuk sinkronisasi jadwal, pembiayaan, dan replikasi praktik baik yang terjadi saat OJL, untuk percontohan bagi daerah atau satuan pendidikan yang lain.

C. Rekomendasi untuk Dinas Provinsi dan Kab/Kota

Pertama, membuat kebijakan terkait penetapan jam klasikal BK. Dinas pendidikan dapat menetapkan jumlah JP per kelas untuk layanan klasikal BK dan sosialisasi internal 7 JBH. Dinas pendidikan dapat menerbitkan surat tugas kepada Fasda untuk mengimplementasikan OJL di satuan pendidikan masing-masing agar legitimasinya meningkat.

Kedua, mengalokasikan anggaran spesifik untuk keberlanjutan program 7 JBH. Dinas pendidikan dapat menyisipkan pos anggaran dalam APBD untuk beberapa agenda terkait 7 JBH; kunjungan untuk monitoring, *coaching clinic* tematik, dan pengadaan sarpras pendukung 7 JBH (proyektor/layar portabel, *backup* materi cetak, dll).

Ketiga, penyesuaian kuota calon Fasda peserta Bimtek. Dinas pendidikan dapat menyelaraskan persentase kuota pelatihan Bimtek Calon Fasda dengan populasi murid. Untuk sekolah dengan populasi besar, dinas pendidikan dapat menambah kuota peserta Bimtek Calon Fasda lebih banyak. Terkait hal ini perlu koordinasi lebih lanjut dengan Ditjen GTKPG dan BGTK.

D. Rekomendasi untuk Satuan Pendidikan

Terkait OJL 7 JBH

Pertama, membuat SOP OJL. Memastikan SOP OJL yang jelas dan terstruktur supaya mudah untuk dipantau dan dievaluasi. Pihak sekolah juga perlu mendukung pelaksanaan OJL melalui penyediaan sarana dan prasarana yang layak.

Kedua, pelaksanaan monitoring internal sekolah. Manajemen sekolah dapat mengagendakan rapat penjaminan mutu secara singkat untuk meninjau progres OJL yang dilakukan oleh calon Fasda dan mendokumentasikan praktik baik untuk disebarluaskan di forum sekolah atau sekolah lain.

Terkait Guru Wali

Pertama, menetapkan kebijakan sekolah yang lebih operasional. Manajemen sekolah dapat memastikan SK guru wali disertai dengan pembagian rasio murid binaan, jadwal pertemuan rutin, dan ekuivalensi JP mingguan.

Kedua, penguatan iklim kolaboratif. Manajemen sekolah bisa mengagendakan forum berbagi praktik antarguru BK, guru wali, dan wali kelas untuk memperkuat peran masing-masing di satuan pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F., & Wahyumiani, N. (2022). Rendahnya Minat Siswa dalam Memanfaatkan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Siswa Kelas IX SMP Dharma Bhakti Bambanglipuro Tahun Ajaran 2021/2022. *Indonesian Journal of Education and Humanity*, 2(2), 27-40.
- Aprianti, S. S., Lestari, D., Astuti, M. P., & Septian, M. R. (2025). Kesenjangan antara Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling di Lapangan: Strategi Mengatasi Overwork Guru BK dalam Mendukung Kesejahteraan Murid di SMK Negeri 1 Haurwangi. *Advice: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 7(1), 36-43. <https://doi.org/10.32585/advice.v7i1.6739>
- Astutik, W., & Dewi, N. L. M. A. (2022). Mental Health Problems Among Adolescent Students. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(2), 85-94. <https://doi.org/10.7454/jki.v25i2.848>
- Bhakti, C. P. (2018). Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik)*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.26740/jp.v2n2.p100-104>
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. *Child Development*, 82(1), 405-432. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
- Fazel, M., Patel, V., Thomas, S., & Tol, W. (2014). Mental health interventions in schools in low-income and middle-income countries. *The Lancet Psychiatry*, 1(5), 388-398. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(14\)70357-8](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)70357-8)

- Firmansyah, A. (2024, Agustus). Kemenko PMK: Indonesia Kekurangan Guru Bimbingan Konseling [News]. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/4271467/kemenko-pmk-indonesia-kekurangan-guru-bimbingan-konseling?>
- Fitriani, E., Neviyarni, N., Mudjiran, M., & Nirwana, H. (2022). Problematika Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(3), 174–180. <https://doi.org/10.24036/nara.v1i3.69>
- Harumbina, D. A., Khoirunnisa, D. R., & Maryam, S. (2022). Bimbingan Klasikal: Meningkatkan Motivasi Belajar Murid. *Assertive: Islamic Counseling Journal*, 1(1), 61–75. <https://doi.org/10.24090/j.assertive.v1i1.6984>
- I-NAMHS. (2022). *Indonesia—National Adolescent Mental Health Survey: National Report Survey*. Universitas Gadjah Mada.
- Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Nomor 17/B/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kompetensi Guru dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan/atau Konseling pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Maleipada, A., Sengaji, M., Langkamang, G., Malaiboti, A., Mata, Y., Dony, P. M. T., & Manapa, I. Y. H. (2025). Analisis Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Penanganan Kesulitan Belajar di SD Inpres 3 Kalabahi Timur. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 460–468.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Perawati. & Santosa, H. (2024). Analisis Dampak Beban Kerja Berlebih Guru

- BK Terhadap Kualitas Layanan BK di Sekolah. *Jurnal Kelitbangan*, 13(1), 1–5.
- Pratiwi, N., & Darminto, E. (2022). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling pada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (SMA) di Surabaya*.
- Putri, I. D. A., Bhakti, C. P., Muarifah, A., & Eka, W. N. (2022). *Komparasi Penggunaan Layanan Bimbingan Klasikal Teknik Bibliotherapy vs Ceramah untuk Meningkatkan Konsentrasi Belajar Murid*.
- Sanchez, A. L., Cornacchio, D., Poznanski, B., Golik, A. M., Chou, T., & Comer, J. S. (2018). The Effectiveness of School-Based Mental Health Services for Elementary-Aged Children: A Meta-Analysis. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 57(3), 153–165. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2017.11.022>
- Wahidah, L. M. (2024). Stigma Negatif Peserta Didik Terhadap Guru Bimbingan Konseling. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11(1).



LAMPIRAN

Tabel 1 Daftar Instansi dan Satuan Pendidikan yang Menjadi Sasaran Studi

No	Kota/Kab-Provinsi	Instansi/Satuan Pendidikan
1	Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB)	BGTK Provinsi NTB; Dinas Pendidikan Kota Mataram; Dinas Pendidikan Provinsi NTB; SMP Negeri 15 Mataram; SMA Negeri 1 Mataram; SMK Negeri 7 Mataram
2	Pekanbaru, Riau	BGTK Provinsi Riau; Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru; Dinas Pendidikan Provinsi Riau; SMP Negeri 9 Pekanbaru; SMA Negeri 10 Pekanbaru; SMK Negeri 2 Pekanbaru
3	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	BGTK Provinsi Kalimantan Selatan; Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin; Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan; SMP Negeri 1 Banjarmasin; SMA Negeri 3 Banjarmasin; SMK Negeri 1 Banjarmasin
4	Manado, Sulawesi Utara	BGTK Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Pendidikan Kota Manado; Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara; SMP Negeri 7 Manado; SMA Negeri 9 Manado; SMK Negeri 6 Manado
5	Kabupaten Bandung, Jawa Barat	BGTK Provinsi Jawa Barat; Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; SMP Negeri 3 Baleendah; SMA Negeri 1 Bojongsoang; SMK Negeri 2 Baleendah

Tabel 2 Instrumen Wawancara untuk Informan Dinas Pendidikan

No	Indikator	Pertanyaan
1	Kebijakan dan Regulasi Daerah	Apa bentuk dukungan kebijakan daerah yang sudah dikeluarkan untuk mendukung implementasi 7 JBH (mis. Surat Edaran, [Surat Keputusan] SK, integrasi dalam RKPD/Renja Dinas)?
2	Fasilitasi dan Pelatihan Lanjutan	Bagaimana Dinas mendukung pelatihan Fasda lanjutan dan penguatan kualitas kegiatan konseling di sekolah?
3	Pendampingan dan Monitoring	Apa peran Dinas dalam pendampingan dan monitoring OJL di sekolah? Instrumen apa yang digunakan?
4	Penganggaran dan Sumber Daya	Bagaimana Dinas mengalokasikan anggaran, SDM, atau dukungan logistik untuk mendukung sekolah dalam implementasi 7 JBH hebat?
5	Keberlanjutan dan Rekomendasi Kebijakan	Apa strategi Dinas untuk memastikan keberlanjutan program di tahun berikutnya, dan apa rekomendasi kebijakan untuk Kementerian agar implementasi lebih optimal?

Tabel 3 Instrumen Wawancara untuk Informan UPT Provinsi

No	Indikator	Pertanyaan
1	Koordinasi dan Penyelenggaraan	Bagaimana mekanisme BGTK berkoordinasi dengan Dinas dan sekolah dalam menyelenggarakan pelatihan 7 JBH Hebat di wilayah Bapak/Ibu?
2	Supervisi dan Pemantauan OJL	Bagaimana BGTK memantau pelaksanaan OJL di sekolah? Instrumen apa yang dipakai untuk mengukur keterlaksanaan dan dampak awal?
3	Penjaminan Mutu dan Evaluasi	Apa mekanisme evaluasi yang dilakukan BGTK untuk menjamin mutu pelatihan dan implementasi program (OJL) di lapangan?
4	Dukungan dan Keberlanjutan	Bagaimana strategi BGTK memastikan keberlanjutan program setelah pelatihan selesai? (misalnya pengimbasan ke guru lain, komunitas belajar guru, kemitraan)
5	Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan	Apa hambatan utama yang ditemui BGTK dalam menjalankan peran (SDM, anggaran, koordinasi, sistem LMS) dan apa rekomendasi perbaikan bagi pemangku kebijakan pusat?

Tabel 4 Instrumen Wawancara untuk Kepala Sekolah terkait Program 7 JBH

No	Indikator	Pertanyaan
1	Kebijakan dan Regulasi Internal	Adakah kebijakan atau regulasi sekolah (SK, Standard Operational Procedure [SOP], atau aturan internal) yang sudah diterbitkan untuk mendukung implementasi 7 JBH?
2	Alokasi Sumber Daya	Bagaimana sekolah mengalokasikan waktu, SDM, dan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan 7 JBH?
3	Kolaborasi dan Koordinasi	Bagaimana mekanisme sekolah dalam mendorong kolaborasi internal (guru BK, guru mapel, tim kurikulum, TPPK) dan eksternal (UPT, orang tua, mitra) untuk keberhasilan implementasi?
4	Monitoring dan Evaluasi	Bagaimana sekolah melakukan monitoring dalam pelaksanaan OJL program 7 JBH? Indikator apa yang dipakai?
5	Keberlanjutan dan Strategi Perbaikan	Apa strategi sekolah untuk memastikan program ini berkelanjutan dan apa masukan Bapak/Ibu untuk stakeholder pengampu kebijakan (UPT, BGTK, Dinas) agar implementasi lebih optimal?

Tabel 5 Instrumen Wawancara untuk Kepala Sekolah terkait Guru Wali

No	Indikator	Pertanyaan
1	Kebijakan Penetapan dan Rasio Binaan	Bagaimana proses penetapan guru wali (GW) di sekolah ini? (SK, kriteria/rasio murid:gw, pembagian binaan). Mengapa skema itu dipilih?
2	Pemahaman Mandat dan Sosialisasi	Bagaimana sekolah memastikan pemahaman mandat GW (akademik, karakter, sosial-emosional) sejak murid masuk hingga lulus? Jelaskan sosialisasi/orientasi yang dilakukan.
3	Penjadwalan, Beban Kerja dan Dokumentasi	Sejauh mana peran GW terjadwal dan terhitung (ekuivalensi jam) serta terdokumentasi (kalender temu, catatan singkat)?
4	Kolaborasi dan SOP Dukungan	Bagaimana kolaborasi operasional GW dengan BK/Wali Kelas/Fasda saat ada kebutuhan murid? Jelaskan contoh dan SOP alur dukungan awal → asesmen singkat → rujukan.

Tabel 6 Instrumen Wawancara untuk Informan Guru Calon Fasda
Variabel Kemampuan Kognitif Fasda

No	Kode	Indikator	Pertanyaan
1	Jurus 1	<i>Knowledge</i>	Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang (jurus 1) Kenali Potensi dalam konteks 7 JBH? Bagaimana penerapan konsep ini membantu guru memahami muridnya?
		<i>Skills</i>	Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam menerapkan teknik asesmen sederhana (misalnya multiple intelligences, gaya belajar, atau minat bakat) untuk mengenali potensi murid? Bisa ceritakan satu contoh prakteknya?
		<i>Attitude</i>	Sejauh mana Bapak/Ibu menilai pentingnya mengenali potensi murid sebelum merancang layanan BK atau orientasi karier? Bagaimana sikap Bapak/Ibu ketika menemukan keragaman potensi murid di kelas?
2	Jurus 2	<i>Knowledge</i>	Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang Kelola Emosi dalam 7 Jurus, dan bagaimana kaitannya dengan kompetensi SEL (5 domain CASEL)?
		<i>Skills</i>	Bisakah Bapak/Ibu ceritakan tentang praktik dalam memfasilitasi latihan mindfulness singkat kepada murid di kelas pendampingan atau saat sosialisasi kepada guru lain (mis. "two feet one breath", "set intentions", "I am aware")?
		<i>Attitude</i>	Bagaimana sikap Bapak/Ibu saat menghadapi emosi kuat (marah/cemas) pada murid atau guru? Apa yang Bapak/Ibu lakukan agar tidak menghakimi dan tetap empatik?
3	Jurus 3	<i>Knowledge</i>	Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang resiliensi dan growth mindset serta mengapa disebut "I"?
		<i>Skills</i>	Bagaimana cara Bapak/Ibu menguatkan murid setelah mengalami kegagalan (mis. gagal penalti/ujian) langkah demi langkah?
		<i>Attitude</i>	Bagaimana cara Bapak/Ibu menumbuhkan keberanian menghadapi tantangan tanpa over-helping kepada murid?

No	Kode	Indikator	Pertanyaan
4	Jurus 4	<i>Knowledge</i>	Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang perbedaan paksaan vs kesadaran internal dalam membangun kebiasaan positif, serta habit loop? (cue-craving-response-reward).
		<i>Skills</i>	Bisakah Bapak/Ibu ceritakan tentang contoh dalam membantu murid membangun satu kebiasaan kecil dengan habit loop.
		<i>Attitude</i>	Menurut Bapak/Ibu, mengapa guru sebaiknya inspirator alih-alih “motivator” eksternal?
5	Jurus 5	<i>Knowledge</i>	Menurut Bapak/Ibu, apa makna “Koneksi sebelum Koreksi” dan mengapa mendengar aktif (SOLER, pertanyaan terbuka, refleksi perasaan, rangkuman) itu krusial?
		<i>Skills</i>	Bisakah Bapak/Ibu memberikan contoh dialog singkat yang mempraktikkan SOLER + pertanyaan terbuka + refleksi perasaan + merangkum?
		<i>Attitude</i>	Bagaimana Bapak/Ibu menjaga sikap nonjudgmental saat murid tampak “mengganggu”?
6	Jurus 6	<i>Knowledge</i>	Menurut Bapak/Ibu, mengapa kolaborasi multipihak penting dalam layanan BK dan kapan mekanisme kolaborasi perlu diaktifkan?
		<i>Skills</i>	Bisakah Bapak/Ibu menjelaskan langkah konferensi kasus dan MTSS/Tiered support: identifikasi, penetapan tujuan/strategi, implementasi-monitoring, evaluasi-eskalasi.
		<i>Attitude</i>	Apa sikap yang Bapak/Ibu pegang supaya kolaborasi berjalan sehat dan setara?
7	Jurus 7	<i>Knowledge</i>	Bisakah Bapak/Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir sistem (5R: Resources-Roles-Relations-Rules-Result) dan konsep Aman-Nyaman-Menggembirakan di sekolah?
		<i>Skills</i>	Bisakah Bapak/Ibu menunjukkan cara sederhana dalam analisis risiko? ancaman (A), kerentanan (R), kapasitas (K) → prioritas aksi.
		<i>Attitude</i>	Bagaimana Bapak/Ibu menghindari “solusi instan” yang mengabaikan keterkaitan sistem?

Tabel 7 Instrumen Wawancara untuk Informan Guru Calon Fasda Variabel Implementasi OJL

No	Indikator	Pertanyaan
1	Dampak Awal OJL	Menurut Bapak/Ibu, apa dampak awal yang paling terasa setelah pelaksanaan OJL di sekolah yang Bapak/Ibu dampingi?
2	Luaran Awal yang Dihasilkan	Produk atau luaran apa yang Bapak/Ibu/ sekolah sudah hasilkan selama OJL ini? (misalnya perangkat, laporan, data asesmen, kegiatan layanan BK)
3	Kendala saat OJL	Apa saja kendala utama yang Bapak/Ibu hadapi selama melaksanakan OJL, baik dari sisi teknis maupun nonteknis?
4	Masukan untuk Stakeholder Pengampu Kebijakan	Menurut Bapak/Ibu, apa masukan yang paling penting bagi stakeholder (UPT, Dinas, Kemendikdasmen) agar implementasi OJL bisa lebih optimal ke depannya?

Tabel 8 Linimasa Pelaksanaan Studi

No	Tanggal	Agenda
1	29 Agust 2025	Workshop Penyusunan Instrumen Wawancara Tahap 1
2	2 Sept 2025	Workshop Penyusunan Instrumen Wawancara Tahap 2
3	11 Sept 2025	Workshop Penyusunan Instrumen Wawancara Tahap 3
4	15 Sept 2025	Workshop Penyusunan Instrumen Wawancara Tahap 4 (Final)
5	17 Sept 2025	Workshop Pembekalan Peneliti Lapangan
6	18-27 Sept 2025	Persiapan Turun Lapangan
7	28 Sept - 1 Okt 2025	Penggalian Data Lapangan dan Transkrip Wawancara
8	7-10 Okt 2025	Workshop Olah dan Verifikasi Data Lapangan
9	14-17 Okt 2025	Workshop Penulisan Laporan Akhir Studi
10	20 Okt 2025	Publikasi Hasil Studi



PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KEMENDIKDASMEN

